



FINTECH UPDATE

EDISI AGUSTUS 2025



Maju Bersama, Merdeka Berinovasi: Satu Visi Seribu Solusi untuk Indonesia

CAPACITY BUILDING
LEMBAGA PISA KEUANGAN
Digital X Real Sector
Launchpad

Rangkaian Kegiatan
Audiensi Aftech dengan
Regulator Bagi Penguatan
Ekosistem Layanan Digital

Penguatan Kapasitas
Profesional Fintech
dan Kegiatan
Edukasi Literasi

Daftar Isi

SOROTAN BULANAN

03	Dirgahayu Ke-80 Republik Indonesia	55	Mengenal Kategori Anggota Baru: Anggota Luar Biasa
04	Sambutan Ketua Umum AFTECH	56	Regulatory News: HukumOnline
05	Struktur Organisasi AFTECH	61	Mengenal FULUS: Fintech & UMKM Jalan Terus
07	Kegiatan Advokasi	62	Sekilas Advokasi AFTECH: Daftar Peraturan Yang Keluar dan Masukan Kebijakan Yang Disampaikan Secara Tertulis
26	Kegiatan Edukasi dan Literasi	65	Kalendar Kegiatan Fintech Internasional
36	Kegiatan Penguatan Kapasitas Komunitas	66	Upcoming Event: Risk & Governance Summit 2025: Empowering the GRC Ecosystem to Drive Economic Growth and National Resilience
47	Liputan Khusus: Mewujudkan Mimpi MBR Punya Hunian Layak Huni: Sinergi Inovasi, Data, dan Regulasi	67	Upcoming Event: Kampagne Nasional: Berantas Scam dan Aktivitas Keuangan Ilegal & 2 nd Indonesia Digital Bank Summit
49	Liputan Khusus: Regulatory Compliance System (RCS) AFTECH dan HukumOnline: Langkah Nyata Mendorong Implementasi Kode Etik Asosiasi dan Tata Kelola Industri yang Baik	69	Upcoming Event: INFINITY Goes to Campus in Conjunction with Kaltim Digifest
51	Liputan Khusus: Kerjasama AFTECH & Bappenas: Inovasi Digital sebagai <i>Enabler</i> Efektif bagi Pertumbuhan Sektor Riil	70	Upcoming Event: FEKDI x IFSE 2025
53	Liputan Khusus: AFTECH Going Global: Bawa Fintech Indonesia ke Panggung Internasional		



MAJU BERSAMA, MERDEKA BERINOVASI:

Satu Visi, Seribu Solusi untuk Indonesia

80

DIRGAHAYU

REPUBLIK INDONESIA

17 AGUSTUS 2025

*Bersama memperkuat ekosistem digital
yang aman, inklusif, dan berkelanjutan*

SAMBUTAN KETUA UMUM

AFTECH



Peringatan 80 tahun kemerdekaan Indonesia bukan sekadar mengenang perjalanan panjang bangsa, tetapi juga momentum untuk merumuskan langkah besar menuju masa depan yang lebih gemilang. Teknologi, khususnya sektor keuangan digital, membuka peluang nyata bagi kita untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi Indonesia menuju visi Indonesia Emas 2045.

Bagi saya, kemerdekaan sejati adalah ketika setiap warga Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, termasuk dalam mengakses layanan keuangan. Dengan hadirnya fintech, kita punya instrumen kuat untuk memperluas inklusi keuangan. Dari Sabang sampai Merauke, setiap orang seharusnya bisa menikmati akses ke layanan yang adil, aman, dan mendukung kesejahteraan.

Namun, tugas ini tidak bisa dijalankan sendirian. Layanan keuangan digital termasuk fintech harus menjadi bagian dari solusi pembangunan nasional, mendukung program kerja pemerintah baru, dan berkolaborasi erat dengan sektor riil—mulai dari perbankan, UMKM, hingga lembaga negara. Hanya dengan kerja sama yang kuat, kita bisa menghadirkan inovasi yang bukan hanya canggih, tetapi juga relevan dan berdampak luas bagi masyarakat.

Momentum penting juga telah kita lewati. Pada 21 Maret 2025, AFTECH menggelar Rapat Umum Anggota (RUA) dan memilih pengurus baru untuk periode 2025–2029. Kepengurusan ini membawa semangat untuk menegaskan peran AFTECH bukan hanya sebagai asosiasi payung ekosistem keuangan digital, tetapi juga sebagai asosiasi yang konkret berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional melalui teknologi dan inovasi.

Kita percaya, layanan keuangan digital di Indonesia harus tumbuh dengan prinsip keberlanjutan, bukan hanya soal ekonomi, tapi juga sosial dan lingkungan. Perlindungan konsumen, tata kelola yang sehat, serta inovasi yang bertanggung jawab akan menjadi fondasi penting dalam perjalanan ini.

Dengan semangat **Maju Bersama, Merdeka Berinovasi**, kita yakin dapat melahirkan seribu solusi baru, membuka kesempatan bagi masyarakat untuk merdeka finansial, dan bersama-sama membangun Indonesia yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Pandu Sjahrir

Ketua Umum AFTECH 2025–2029

Pengurus AFTECH

Periode 2025-2029

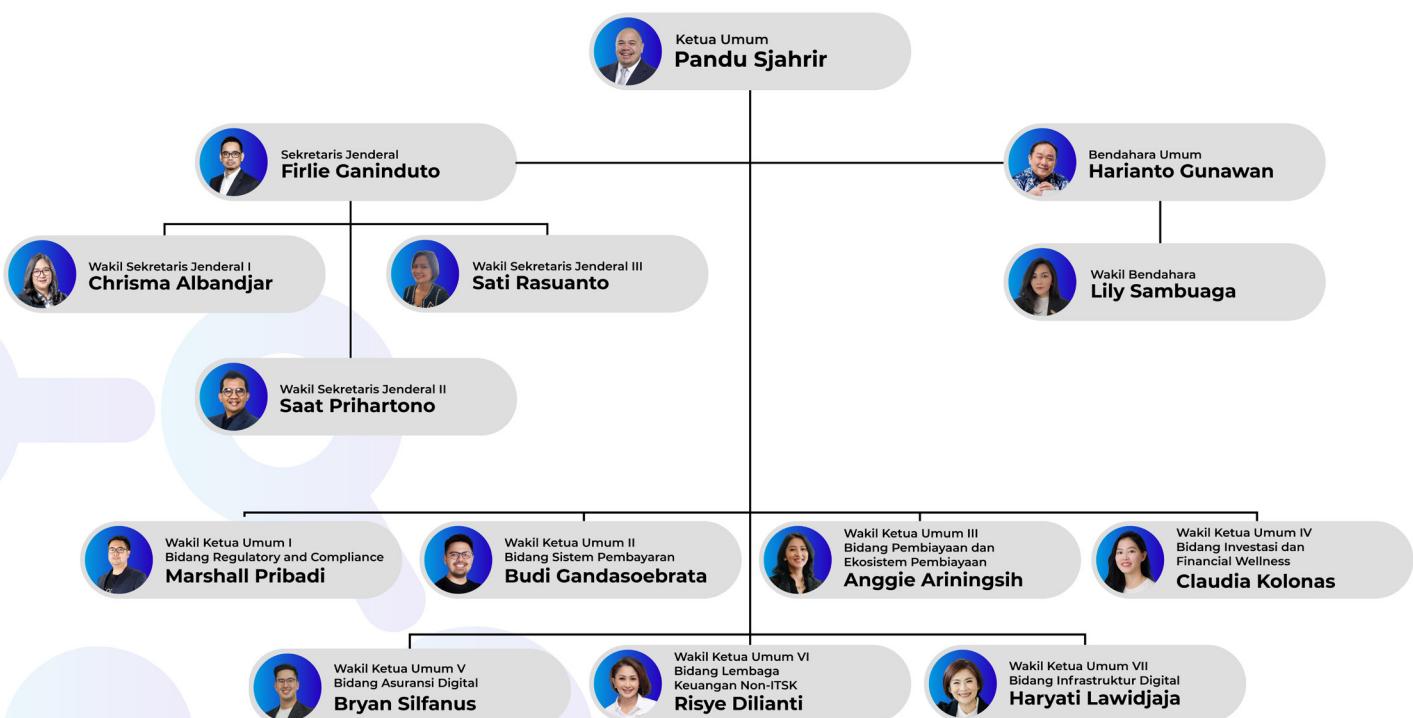
Dewan Pengawas



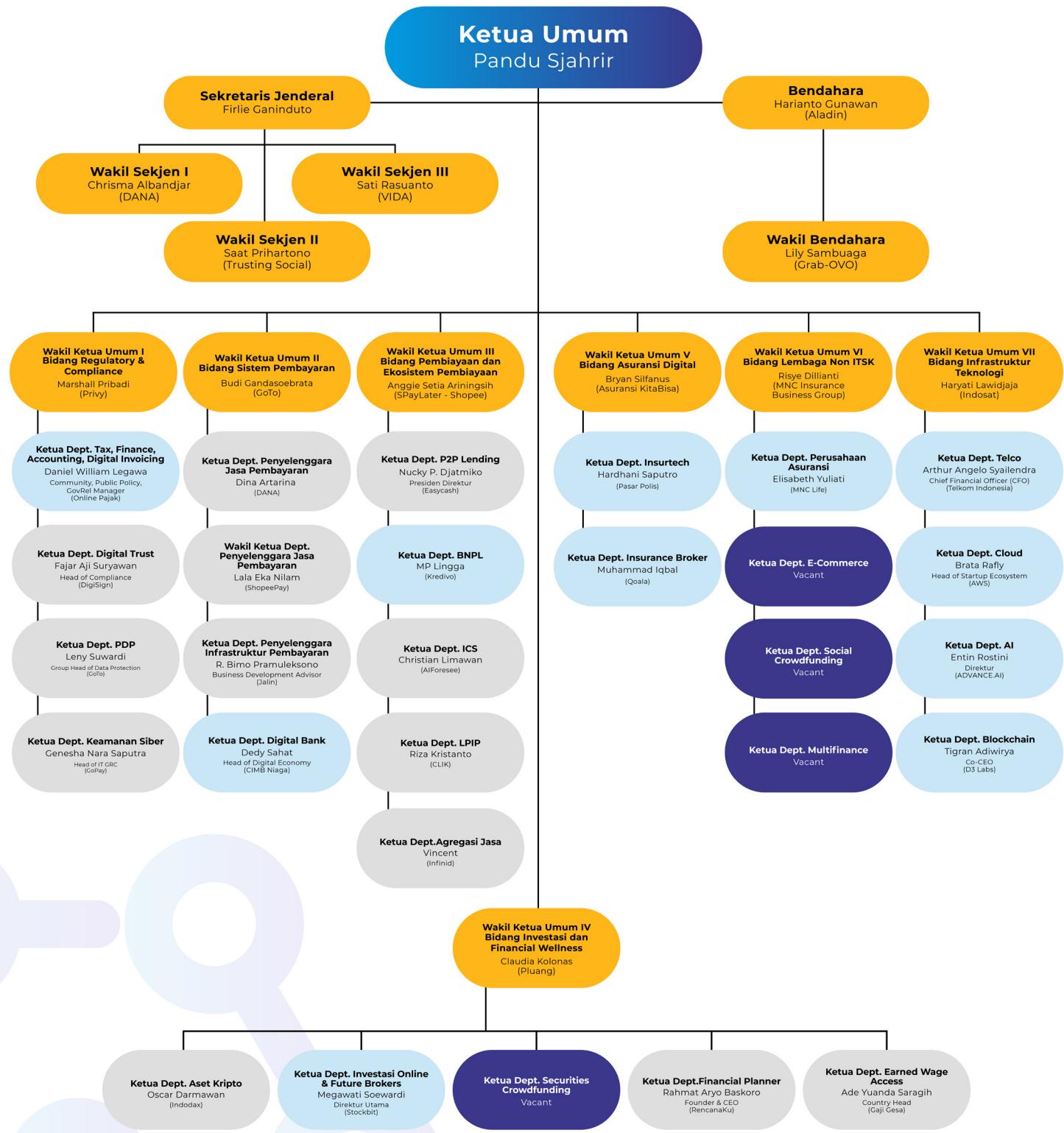
Dewan Kehormatan/Etik



Dewan Pengurus Harian



Pengurus Departemen & Ketua Departemen AFTECH



KEGIATAN ADVOKASI

Audiensi Bersama Kepala Eksekutif IAKD OJK: Audiensi Perdana Pengurus AFTECH Periode 2025-2029 untuk Mendukung Tata Kelola, Regulasi dan Infrastruktur Fintech



Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Pandu Sjahrir, melakukan audiensi dengan Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto (IAKD) Otoritas Jasa Keuangan OJK, Hasan Fawzi (22/4). Pertemuan ini merupakan agenda advokasi perdana pengurus baru AFTECH.

Dalam audiensi ini, Ketua Umum dan perwakilan pengurus baru AFTECH memaparkan hasil Rapat Umum Anggota (RUA), termasuk program kerja dan penegasan komitmen AFTECH sebagai mitra strategis OJK dalam membangun industri fintech yang aman, inklusif, dan berkelanjutan. 3 (tiga) agenda besar yang menjadi fokus kerja 4 (empat) tahun kedepan adalah: penguatan tata kelola industri, dukungan terhadap penyusunan regulasi turunan dari UU P2SK, serta pengembangan infrastruktur kolaboratif yang secara kritikal dibutuhkan oleh penyelenggara layanan keuangan digital di Indonesia.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut Sekretaris Jenderal AFTECH Firlie Ganinduto dan Wakil Bendahara AFTECH Lily M. Sambuaga. Kehadiran jajaran pengurus baru ini menandai komitmen asosiasi untuk membangun dialog konstruktif dengan regulator serta memperluas kolaborasi lintas sektor demi memperkuat fondasi ekosistem fintech Indonesia.

KEGIATAN ADVOKASI

AFTECH Hadiri Peluncuran OJK Infinity 2.0, Dukung Penguatan Kolaborasi Digitalisasi Keuangan



Transformasi digital sektor keuangan di Indonesia tengah memasuki babak baru. Pertumbuhan layanan keuangan berbasis teknologi kian pesat, namun perlu didorong untuk semakin dekat dalam mendorong produktivitas dari sektor-sektor riil ekonomi nasional. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) merespons dinamika ini dengan meluncurkan OJK Infinity 2.0, pusat inovasi yang dirancang untuk menjadi akselerator kolaborasi lintas sektor, sekaligus laboratorium kebijakan berbasis teknologi.

Peluncuran berlangsung di Menara Radius Prawiro, Jakarta Pusat, Kamis, 24 April 2025. Rangkaian acara termasuk Focus Group Discussion (FGD) bertema "Kerja Sama Pengembangan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) dan Ekosistem Keuangan Digital", menghadirkan regulator, kementerian, asosiasi, akademisi, dan mitra internasional.

AFTECH turut menghadiri kegiatan strategis ini, dan Sekretaris Jenderal AFTECH, Firlie Ganinduto, memandu sesi diskusi yang membahas empat inisiatif utama OJK Infinity 2.0, yaitu:

Tokenisasi industri game bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) dan Asosiasi Game Indonesia (AGI).

Pengembangan talenta *blockchain* melalui program hackathon.

Digitalisasi ekosistem sapi perah bersama International Labour Organization (ILO) dan koperasi lokal.

Peluncuran edisi perdana buletin Beyond Infinity bertema keamanan siber

Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, dan Duta Besar Swiss untuk Indonesia H.E. Olivier Zehnder. Dalam kegiatan ini, OJK juga melakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan Kemenparekraf, serta menampilkan showcase proyek kerja sama lintas sektor berbasis pendekatan Pentahelix—kolaborasi antara regulator, industri, akademisi, masyarakat, dan media. Salah satu contohnya adalah dengan ILO pada industri susu perah.

KEGIATAN ADVOKASI

AFTECH Dukung Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Memiliki Rumah: Kolaborasi Fintech dan Program Perumahan Nasional



Pemanfaatan fintech sebagai *enabler* pertumbuhan sektor riil saat ini terus didorong. Selain untuk memperluas akses pembiayaan bagi UMKM, teknologi keuangan mulai diarahkan untuk mendukung sektor prioritas pembangunan, dari pertanian hingga infrastruktur. Salah satu program strategis yang dinilai potensial bermitra dengan fintech adalah program perumahan nasional bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Badan Pusat Statistik mencatat, per Maret 2025 jumlah penduduk miskin mencapai 23,85 juta jiwa, atau sekitar 8,47% dari total populasi. Kelompok ini menjadi sasaran utama program perumahan nasional. Backlog perumahan masih tinggi, sekitar 9,9 juta unit. Pada 2023, pemerintah membangun 1.217.794 unit rumah, di mana hampir 83% diperuntukkan bagi MBR.

Keterbatasan akses pembiayaan menjadi tantangan utama MBR untuk memiliki rumah. Inovasi teknologi, termasuk layanan Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA), diyakini dapat menjawab kendala ini. Wakil Sekretaris Jenderal II AFTECH, Saat Priharto, menyatakan pemanfaatan data alternatif oleh PKA mampu memperluas penilaian kelayakan kredit bagi MBR, sehingga membuka peluang mereka memperoleh pembiayaan rumah.

AFTECH menegaskan komitmennya mendorong inovasi teknologi yang dapat meningkatkan kesempatan ekonomi bagi MBR, khususnya melalui Program Kerja AFTECH Digital x Real Sector Launchpad. Partisipasi PKA dalam program strategis perumahan nasional diyakini mendukung pemerataan ekonomi sekaligus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional.

KEGIATAN ADVOKASI

AFTECH dan B-Universe Bahas Regulasi Perdagangan Derivatif Keuangan



Produk derivatif keuangan di Indonesia menunjukkan tren pertumbuhan seiring meningkatnya minat investor pada instrumen berbasis efek luar negeri. Minat ini didorong oleh diversifikasi portofolio, potensi imbal hasil yang kompetitif, dan akses teknologi perdagangan yang kian mudah. Namun, perkembangan cepat ini juga memunculkan tantangan baru: kebutuhan akan regulasi yang mampu mengikuti dinamika global tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan perlindungan konsumen.

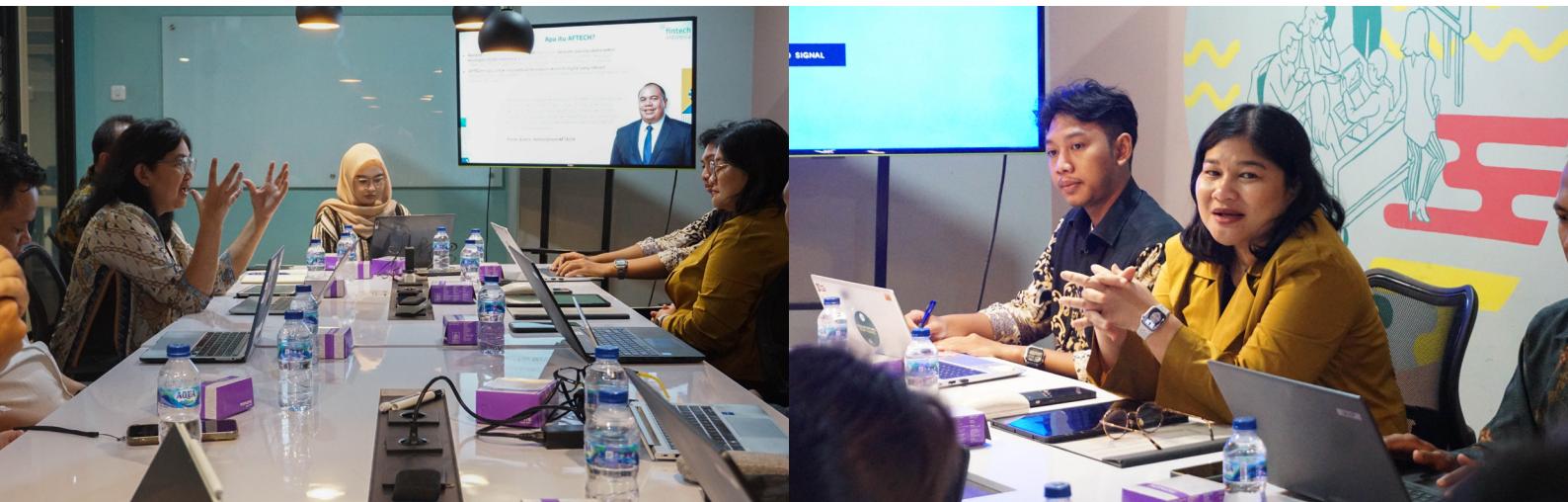
Dalam rangka menjawab kebutuhan tersebut, AFTECH bersama B-Universe menyelenggarakan *Focus Group Discussion* (FGD) dengan tema

"Regulasi dan Pengawasan Perdagangan Derivatif Keuangan dengan Underlying Berupa Efek Indeks Saham Asing dan Saham Tunggal Asing" di Jakarta, 15 Mei 2025. Kegiatan yang juga merupakan implementasi Program Kerja Wakil Ketua Umum IV 2025-2029, Claudia Kolonas, ini menghadirkan narasumber dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), asosiasi industri, pakar hukum, dan pelaku pasar.

Hasil dari kegiatan FGD ini digunakan sebagai bahan masukan untuk penyusunan regulasi. AFTECH berkomitmen untuk membangun kerangka regulasi layanan keuangan yang kondusif, selaras dengan program kerja pengurus periode 2025-2029.

KEGIATAN ADVOKASI

AFTECH dan KPK Perkuat Sinergi Antikorupsi di Industri Fintech



Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), yang diwakili oleh Ketua Dewan Etik, Harun Reksodiputro, Anggota Dewan Etik Prof. Yudho Giri Sucahyo dan Alison Jap, serta Wakil Sekretaris Jenderal I, Chrisma Albandjar melakukan audiensi dengan perwakilan Direktorat Antikorupsi Badan Usaha Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 5 Juni 2025 di Kantor Sekretariat AFTECH. Pertemuan ini membahas potensi risiko korupsi di sektor usaha, termasuk industri fintech, serta implementasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi.

KPK memegang peran strategis dalam menjaga integritas sektor swasta. Data KPK 2004 - 2024 mencatat 1.052 kasus penyuapan, 407 kasus pengadaan barang/jasa, 64 pencucian uang, dan berbagai modus lainnya. Sektor swasta menjadi penyumbang terbesar pelaku korupsi dengan 468 orang, diikuti penyelenggara negara (432) dan anggota DPR/DPRD (360). Sektor keuangan masuk dalam sembilan sektor prioritas nasional pencegahan korupsi yang menjadi fokus KPK.

Dalam audiensi tersebut, KPK mensosialisasikan Panduan Cegah Korupsi pada Badan Usaha (Panduan CEK), instrumen self-assessment yang mengacu pada Perma 13/2016 dan UU 1/2023 tentang pemidanaan korporasi. Panduan ini memuat checklist prosedur antikorupsi dan mendorong penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) ISO 37001.

AFTECH menyatakan dukungan penuh terhadap inisiatif ini sebagai bagian dari komitmen menciptakan ekosistem fintech yang bersih, berintegritas, dan berkelanjutan. Ke depan, AFTECH akan menindaklanjuti hasil pertemuan dengan pelatihan anggota, penyusunan panduan kepatuhan, dan kampanye kesadaran publik, bersama KPK dan OJK, untuk memastikan prinsip antikorupsi tertanam di seluruh lini operasional anggotanya.

KEGIATAN ADVOKASI

Audiensi AFTECH dan OJK Pengawas Perbankan: Kolaborasi untuk Layanan Keuangan Digital Yang Lebih Aman dan Inklusif



Transformasi perbankan digital di Indonesia bergerak cepat, mendorong kebutuhan kolaborasi erat antara regulator dan pelaku industri. Di tengah percepatan inovasi, sinergi menjadi kunci agar pertumbuhan ekosistem tetap inklusif, aman, dan berdaya saing global.

Sebagai bagian dari upaya memperkuat koordinasi, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) menggelar audiensi dengan Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, Dian Ediana Rae, pada 10 Juni 2025. Pertemuan ini dihadiri Wakil Ketua Umum I, Marshall Pribadi; Wakil Ketua Umum II Budi Gandasoebroto; Wakil Ketua Umum III Anggie Ariningsih; Sekretaris Jenderal Firlie Ganinduto; serta Wakil Sekretaris Jenderal I Chrisma Albandjar.

Dalam audiensi tersebut, AFTECH memperkenalkan susunan kepengurusan baru periode 2025–2029 serta memaparkan program kerja lima tahun ke depan, khususnya yang bersinggungan dengan perbankan dan layanan perbankan digital. AFTECH juga menyampaikan agenda penyelenggaraan The 2nd Indonesia Digital Bank Summit (IDBS) 2025: "Securing Economic Growth: Trusted Digital Finance as an Enabler of an Inclusive Economy" yang bertujuan untuk menjadi ajang meningkatkan sinergi kolaborasi guna mendorong layanan perbankan digital yang aman dan inklusif di Indonesia.



(Bersambung ke halaman berikutnya)

Audiensi juga membahas isu-isu strategis, termasuk: penguatan kolaborasi antara perbankan dan fintech untuk memperluas inklusi keuangan, tantangan operasional perbankan saat ini (khususnya terkait maraknya scam dan kejahatan siber), serta pentingnya penguatan tata kelola. OJK menekankan bahwa risiko siber, fraud, dan *scam* yang marak belakangan ini menjadikan pengawasan dan tata kelola menjadi prioritas. Fintech maupun penyedia jasa teknologi pihak ketiga dituntut menunjukkan implementasi tata kelola yang baik sehingga dapat menjaga kepercayaan publik dan stabilitas sistem keuangan.

Dari hasil audiensi, selain memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan 2nd IDBS, OJK juga mendukung penyelenggaraan kegiatan sosialisasi panduan tata kelola kecerdasan buatan (AI) serta penyampaian ulang terkait pengaturan terhadap penyedia teknologi informasi bagi perbankan di Indonesia oleh AFTECH

Melalui pertemuan ini, AFTECH menegaskan komitmennya menjadi mitra strategis OJK dalam membangun ekosistem keuangan digital yang inovatif, inklusif, dan berkelanjutan. Keberhasilan kolaborasi ini akan tercermin ketika kepercayaan publik terhadap layanan keuangan digital semakin kuat, dan *intermediary effect*-nya berhasil meningkatkan pertumbuhan sektor riil.



KEGIATAN ADVOKASI

Menuju Era Rupiah Digital: Kolaborasi untuk Ekosistem Pembayaran Masa Depan



Bank Indonesia tengah memacu transformasi sistem keuangan nasional lewat pengembangan mata uang digital bank sentral. Inisiatif ini sebagaimana dijelaskan dalam Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2030, menargetkan hadirnya ekosistem Rupiah Digital yang terintegrasi, inklusif, sekaligus lincah mengikuti perkembangan teknologi.



Sebagai bagian dari proses itu, Bank Indonesia menggelar Focus Group Discussion pada 13 Juni 2025. Forum ini mempertemukan regulator, pelaku industri, dan pemangku kepentingan lain untuk menajamkan rancangan Rupiah Digital Cash Ledger. Dari industri, hadir antara lain Sekretaris Jenderal AFTECH, Firlie Ganinduto, yang menekankan pentingnya keterlibatan asosiasi dalam mengawal desain dan implementasi rupiah digital agar benar-benar relevan dengan kebutuhan pasar.

AFTECH berkomitmen untuk konsisten mendukung Bank Indonesia dalam merealisasikan visi dan misi BSPI 2030. Untuk itu sebagai bagian dari program kerja Departemen, AFTECH akan terus memantau perkembangan dari implementasi Rupiah Digital ini guna mendukung terciptanya sistem pembayaran yang modern dan aman, tapi juga menopang pertumbuhan sektor riil.

KEGIATAN ADVOKASI

Audiensi Bersama IASC: Kerjasama Untuk Menangkal Gelombang Scam di Ekosistem Keuangan Digital



Ancaman keuangan ilegal saat ini menjadi tantangan serius bagi ekosistem digital Indonesia. Data Satgas PASTI mencatat, sejak 2017 hingga April 2025, sebanyak 4.053 aplikasi, situs, dan konten ilegal diblokir, 117 rekening serta 2.422 nomor telepon/WhatsApp dibekukan, dengan total kerugian masyarakat mencapai Rp142,13 triliun.

Terkait dengan perkembangan diatas, *scam* juga menjadi ancaman serius bagi ekosistem ekonomi dan keuangan digital Indonesia. Statistik terbaru Indonesia Anti Scam Center (IASC) menunjukkan skala dan tingkat keseriusan dari kejahatan *scam* ini: sejak November 2024 hingga Juni 2025, tercatat 166.258 laporan *scam* dengan total kerugian Rp2,6 triliun. Dari 219.168 rekening yang dilaporkan, hanya 49.316 rekening (22,5 persen) berhasil diblokir, dengan dana terselamatkan Rp163,3 miliar.

Mengingat pentingnya isu *scam* dan transaksi keuangan ilegal bagi industri fintech, maka, AFTECH menggelar audiensi dengan Satgas PASTI pada 16 Juni 2025 di Gedung Sumitro Djojohadikusumo OJK. Kegiatan yang dihadiri oleh Wakil Ketua Umum I, Marshall Pribadi, dan Sekretaris Jenderal, Firlie Ganinduto ini membahas bentuk kolaborasi AFTECH dalam rangka mendukung IASC.

Salah satu bentuk dukungan terkait dengan implementasi program kerja AFTECH yaitu pengembangan *fraud identification system*. Selain itu beberapa topik diskusi termasuk: sistem identitas digital, pemblokiran rekening, hingga berbagai strategi komunikasi untuk meningkatkan kesadaran konsumen (contoh: integrasi pop-up peringatan *scam* di aplikasi anggota AFTECH) turut dibicarakan. Kegiatan audiensi juga mendiskusikan potensi penyelenggaraan joint event launching kampanye nasional dan 2nd Indonesia Digital Bank Summit.

Kolaborasi AFTECH dan IASC merupakan wujud nyata komitmen regulator dan industri dalam pemberantasan *scam* dan transaksi ilegal melalui adopsi teknologi dan kegiatan edukasi literasi yang efektif.

KEGIATAN ADVOKASI

AFTECH dan Bank Indonesia Perkuat Sinergi Sistem Pembayaran Digital



Sistem pembayaran digital kini menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Di tengah pertumbuhan transaksi yang kian pesat, koordinasi antara regulator dan pelaku industri menjadi kunci agar ekosistem berjalan inklusif, aman, dan berdaya saing.



Pada 25 Juni 2025, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) mengadakan audiensi dengan Dicky Kartikoyono, Kepala Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia. Pertemuan ini menjadi momentum penting bagi AFTECH untuk memperkenalkan kepengurusan baru periode 2025–2029, sekaligus memaparkan program kerja prioritas. Hadir mewakili Dewan Pengurus Harian (DPH) AFTECH, adalah: Budi Gandasoerata (Wakil Ketua Umum II), Claudia Kolonas (Wakil Ketua Umum IV), Lily Sambuaga (Wakil Bendahara), Sati Rasuantor (Wakil Sekretaris Jenderal III), dan Chrisma Albandjar (Wakil Sekretaris Jenderal I).

Beberapa agenda strategis dibahas dalam audiensi. Di antaranya, kelanjutan kolaborasi AFTECH dengan Bank Indonesia dalam penyelenggaraan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia (FEKDI) x Indonesia Fintech Summit & Expo (IFSE). Audiensi juga menyoroti maraknya *cybercrime*, *scam*, dan transaksi ilegal, khususnya praktik judi online, yang kini menjadi tantangan serius bagi sistem pembayaran nasional. Kripto yang dimanfaatkan secara tidak bertanggungjawab dalam transaksi keuangan ilegal juga menjadi perhatian BI.

Selain isu keamanan, Bank Indonesia juga mendukung program *Digital x Real Sector* AFTECH. Secara khusus saat ini BI mendorong agar talenta digital dan content creator Indonesia untuk dapat menembus pasar global. Selanjutnya, AFTECH juga menyampaikan informasi sekaligus dukungan terhadap penyelenggaraan *The 2nd Indonesia Digital Bank Summit (IDBS)*.

AFTECH dan Bank Indonesia sama-sama berkomitmen untuk terus berkolaborasi membangun fondasi keuangan digital Indonesia: lebih inklusif, inovatif, aman, sekaligus mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan.

KEGIATAN ADVOKASI

ASEAN Digital Economic Framework Agreement (DEFA): Masa Depan Arus Data Lintas Negara untuk Integrasi Ekonomi Digital Kawasan



ASEAN tengah menyiapkan Digital Economy Framework Agreement (DEFA), sebuah payung kerjasama besar yang digadang-gadang bakal menjadi AFTA versi digital. Melalui kesepakatan ini, arus data, sistem pembayaran, dan layanan digital lintas batas di kawasan diharapkan terhubung lebih mulus, aman, dan inklusif. Tujuan dari DEFA termasuk penguatan kepercayaan konsumen, peningkatan peluang bagi UMKM dan startup untuk menembus pasar regional, sekaligus *positioning* ASEAN sebagai salah satu pusat gravitasi ekonomi digital dunia.



Arus data merupakan salah satu isu strategi dalam pembahasan ASEAN DEFA, dan sehubungan dengan pembahasan ini US-ASEAN Business Council (USABC) menyelenggarakan *In Country Workshop* untuk Indonesia di Hotel Borobudur pada tanggal 30 Juni 2025. Penyelenggaraan workshop ini diharapkan dapat memperkuat pemahaman para pemangku kepentingan nasional mengenai DEFA, menggali peluang yang ditawarkan kerangka kerja sama digital ASEAN-Amerika Serikat, sekaligus merumuskan masukan konkret dari Indonesia untuk mendorong harmonisasi regulasi di kawasan.

Wakil Ketua Umum II Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Budi Gandasoebarta, hadir sebagai narasumber dan menekankan pentingnya keberadaan kebijakan tata kelola data lintas batas yang disepakati dan diadopsi oleh seluruh ASEAN Members States. Budi juga menekankan pentingnya ekosistem regulasi yang harmonis di kawasan. "Akses data yang aman, transparan, dan terintegrasi akan menjadi kunci daya saing ekonomi digital ASEAN," ujar Budi.

US-ASEAN Digital Economy Framework Agreement yang didorong Amerika Serikat sebagai salah satu agenda geopolitik sekaligus ekonomi, menawarkan peluang sekaligus risiko bagi Indonesia. Karena itu, AFTECH berkomitmen untuk aktif mengawal agar kerjasama internasional ini serta harmonisasi aturan tetap memberi ruang bagi inovasi lokal dan melindungi kepentingan industri fintech nasional.

KEGIATAN ADVOKASI

AFTECH Perkuat Sinergi dengan OJK untuk Ekosistem Keuangan Digital yang Aman



Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) kembali memperkuat sinerginya dengan regulator. Pada 9 Juli 2025, perwakilan Dewan Pengurus Harian (DPH) AFTECH melakukan audiensi dengan Ibu Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK, di Jakarta.

Diwakili oleh Wakil Ketua Umum I, Marshall Pribadi; Sekretaris Jenderal, Firlie Ganinduto; dan Wakil Sekretaris Jenderal I, Chrisma Albandjar; dalam pertemuan ini AFTECH memperkenalkan kepengurusan AFTECH periode 2025-2029 sekaligus memaparkan program kerja prioritas, khususnya yang terkait dengan edukasi literasi serta perlindungan konsumen.

Salah satu topik hangat diskusi adalah rencana penyelenggaraan The 2nd Indonesia Digital Bank Summit (IDBS) yang mengangkat tema *“Securing Economic Growth: Trusted Digital Finance as an Enabler of an Inclusive Economy”*. Agenda IDBS sejalan dengan inisiatif Indonesia Anti Scam Center (IASC) yang fokus memperkuat perlindungan masyarakat dari maraknya penipuan digital. Pertemuan ini juga membahas peluang kolaborasi antara IDBS dan IASC sebagai upaya konkret memerangi scam dan kejahatan finansial di era digital.

AFTECH menegaskan, kemajuan industri fintech hanya akan berkelanjutan bila dibangun di atas kepercayaan masyarakat. Karena itu, asosiasi berkomitmen menjadi mitra strategis OJK dalam merancang kebijakan yang inklusif, inovatif, dan berpihak pada kepentingan konsumen.



KEGIATAN ADVOKASI

AFTECH dan Gates Foundation Bahas Inklusi Keuangan & Digital Public Infrastructure Bersama Wakil Menteri Keuangan



Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) menghadiri pertemuan strategis bersama para grantee Gates Foundation dengan Wakil Menteri Keuangan, Thomas Djiwandono, pada 17 Juli 2025. Pertemuan itu membahas capaian program grantee Gates Foundation di Indonesia serta langkah mendorong inklusi keuangan dan penguatan Digital Public Infrastructure (DPI).

AFTECH diwakili Wakil Ketua Umum II, Budi Gandasoerata, dan Sekretaris Jenderal, Firli Ganinduto. Dalam forum itu, AFTECH memaparkan dukungan Gates Foundation sejak 2019, termasuk inisiatif yang dijalankan dan dampaknya terhadap ekosistem ekonomi digital.

Dua isu utama mengemuka. Pertama, bagaimana memperluas akses layanan keuangan digital hingga ke luar kota besar. Kedua, pentingnya pembangunan DPI sebagai fondasi teknologi yang terintegrasi dan aman untuk menopang ekonomi digital nasional. Kedua isu ini dipandang kunci bagi pertumbuhan yang lebih inklusif.

AFTECH menegaskan komitmen bermitra dengan pemerintah dan pemangku kepentingan, baik dalam maupun luar negeri, menghadirkan inovasi digital yang adil dan bertanggung jawab. Perlindungan konsumen, terutama kelompok rentan, menjadi perhatian agar transformasi digital tak meninggalkan siapa pun.

KEGIATAN ADVOKASI

AFTECH dan OJK Bahas Penguatan Tata Kelola Ekosistem Inovasi Teknologi Keuangan



Ketua Umum Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH), Pandu Sjahrir, bersama jajaran Dewan Pengurus Harian menghadiri audiensi dengan Agusman, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya (PVML) dan jajaran pejabat OJK terkait pada 21 Juli 2025. Turut hadir mewakili AFTECH adalah Wakil Ketua Umum I, Marshall Pribadi; Wakil Ketua Umum III, Anggie Ariningsih; Sekretaris Jenderal, Firlie Ganinduto; Wakil Sekretaris Jenderal II, Saat Prihartono; dan Nucky P. Djatmiko (Ketua Departemen LPBBTI, AFTECH).

Agenda pembahasan audiensi termasuk berbagai tantangan yang dihadapi oleh industri LPBBTI saat ini serta dampaknya terhadap ekosistem layanan keuangan digital. Selain itu, AFTECH juga memperkenalkan struktur dan arah program kerja 2025–2029 khususnya terkait penguatan tata kelola, inovasi digital yang inklusif, serta perlindungan konsumen. Diskusi juga menyoroti pentingnya kolaborasi ekosistem Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK) sesuai amanat Undang-Undang No. 4 Tahun 2023.

AFTECH menegaskan bahwa kolaborasi erat antara regulator dan pelaku industri menjadi kunci agar layanan keuangan digital mampu berfungsi sebagai enabler yang efisien dan efektif. Sinergi ini diharapkan memperkuat ekosistem keuangan digital sehingga tumbuh tangguh, terpercaya, dan memberi kontribusi nyata bagi perekonomian nasional.



KEGIATAN ADVOKASI

Sinergi AFTECH & Komdigi: Bersama Bentengi Konsumen Layanan Digital dari *Scam & Fraud*



AFTECH melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) RI, Alexander Sabar, guna membahas strategi pencegahan penipuan digital yang kian marak. Audiensi dihadiri oleh perwakilan Dewan Pengurus Harian (DPH) yaitu: Wakil Ketua Umum I AFTECH, Marshall Pribadi, dan Wakil Ketua Umum VII, Haryati Lawidaja.

Pertemuan strategis ini bertujuan untuk memperkuat kerja sama antara regulator dan industri dalam melindungi konsumen layanan keuangan digital. Tiga isu utama mengemuka: pemanfaatan data blacklist rekening sebagai langkah preventif; penguatan platform CekRekening.id sebagai sarana publik memverifikasi rekening mencurigakan; serta rencana pengembangan dashboard nasional untuk memantau dan merespons laporan scam secara terintegrasi.

AFTECH juga menyampaikan rencana kerja terkait pembangunan fraud detection system yang kemudian disambut dengan beberapa potensi kolaborasi dengan Komdigi. Selain itu, AFTECH dan Komdigi membicarakan rencana menggelar CISO Bootcamp guna berbagi praktik terbaik keamanan siber dan perlindungan data pribadi di sektor jasa keuangan digital.

Melalui sinergi regulator, pelaku industri, dan masyarakat, ekosistem layanan keuangan digital di Indonesia diharapkan semakin aman, tangguh, dan terpercaya menghadapi berbagai modus kejahatan digital yang terus berevolusi.



KEGIATAN ADVOKASI

Bentengi Pelajar dari Judi Online: AFTECH dorong Literasi dan Kolaborasi Lintas Sektor dalam DKT Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah



AFTECH menghadiri Diskusi Kelompok Terpumpun (DKT) yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah pada Rabu, 16 April 2025. Pertemuan ini menyoroti maraknya perjudian daring (judol) di kalangan peserta didik, terutama tren peningkatan pelaku judi online dibawah usia 11 tahun, serta dalam range usia 11-19 tahun. Isu ini menjadi kian mendesak di tengah penetrasi gawai dan internet yang semakin luas.

Perwakilan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) menyampaikan pentingnya penerapan pendekatan hulu – hilir dalam menghadapi masalah judol bagi peserta didik: dari mulai membangun pemahaman sejak dini di satuan pendidikan dan keluarga, sembari memperkuat kolaborasi antar-pemangku kepentingan agar intervensi lebih terarah dan berkelanjutan.

AFTECH dan narasumber yang hadir mengungkapkan bahwa sejumlah modus operandi dan model bisnis fintech kerap disalahgunakan untuk transaksi judi online. Misalnya, penggunaan dompet digital sebagai sarana top-up tersembunyi, rekening pinjaman peer-to-peer yang dipakai untuk memutar dana taruhan, hingga payment gateway yang dimanipulasi melalui merchant fiktif. Pola-pola ini penting untuk dapat dipetakan secara kolektif agar dapat ditutup celahnya melalui regulasi maupun pengawasan bersama.

Sejumlah regulator turut memaparkan langkah dan rencana mereka. Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), serta lembaga masyarakat ICT Watch serta menekankan perlunya sinergi lintas sektor dalam menghadapi judi online, khususnya yang menyasar peserta didik. Paparan itu diperkaya dengan informasi kesaksian orang tua peserta didik mengenai kasus kecanduan judol yang dimulai dari ketidaktahuan atau ketidaksengajaan, yang ditangkap oleh seluruh narasumber sebagai materi untuk bahan kampanye nasional.

Seluruh narasumber sepakat bahwa penanganan judi online tidak dapat dilakukan sendirian. Diperlukan keterpaduan kebijakan, penguatan kapasitas di sekolah dan keluarga, serta peran aktif ekosistem digital untuk mempersempit ruang eksposur anak-anak terhadap konten taruhan. Forum ini menjadi momentum untuk mengonsolidasikan agenda perlindungan peserta didik, sekaligus menegaskan kesiapan semua pihak—pemerintah, industri, dan masyarakat—untuk bersama menjaga ruang digital tetap sehat dan aman bagi generasi muda.

KEGIATAN ADVOKASI

Kick-off Bidang Pembiayaan & Ekosistem Pembiayaan AFTECH: Menyatukan Arah, Memantapkan Implementasi Program Kerja Departemen LPBBTI

Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) menggelar kick-off meeting bersama anggota AFTECH yang bergerak di industri Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi (LPBBTI) bidang pembiayaan & ekosistem pembiayaan pada Selasa, 20 Mei 2025. Pertemuan ini dipimpin oleh Wakil Ketua Umum III Bidang Pembiayaan dan Ekosistem Pembiayaan, Anggie Ariningsih. Pertemuan ini menjadi langkah untuk menyelaraskan prioritas, menampung masukan, sekaligus merumuskan arah kerja kolektif empat tahun ke depan.

Diskusi berlangsung terbuka, dengan fokus pada kebutuhan mendasar ekosistem: penguatan tata kelola, peningkatan kualitas layanan, serta peneguhan keamanan digital dan perlindungan pengguna. Masukan anggota dipetakan menjadi prioritas yang realistik dan dapat dijalankan, dengan menekankan keseimbangan antara dorongan inovasi dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Sebagai tindak lanjut, tim bidang menyiapkan rencana kerja yang terukur lengkap dengan sasaran, indikator keberhasilan, dan jadwal implementasi. Sejumlah inisiatif jangka pendek disiapkan sebagai quick wins untuk menunjukkan hasil awal, sementara program jangka menengah diarahkan pada konsolidasi standar dan peningkatan kapasitas anggota. Dengan fondasi yang kuat sejak awal, AFTECH menempatkan 2025 sebagai tahun eksekusi: kolaborasi yang lebih solid, kebijakan berbasis data, dan dampak nyata bagi industri maupun pengguna.



KEGIATAN ADVOKASI

AFTECH Members Gathering: ITSK Chapter



Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) menggelar *Members Gathering: ITSK Chapter* pada 24 Juli 2025 di Habitate Restaurant, Jakarta. Acara ini dihadiri hampir 70 peserta dari 40 penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), mencakup model bisnis Penyelenggara Kredit Alternatif (PKA), Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK), hingga e-KYC. Peserta yang seluruhnya merupakan anggota AFTECH berasal dari beragam latar belakang perizinan: mulai dari yang telah terdaftar, belum direkomendasikan, belum terdaftar, hingga yang belum direkomendasikan melalui proses sandbox.

Dalam kegiatan ini, perwakilan tiap model bisnis menyampaikan pandangan dan pengalaman mereka, terutama menyangkut tantangan proses perizinan dan pengawasan yang dilakukan oleh OJK. Sejumlah pertanyaan teknis juga mencuat, mencerminkan kebutuhan akan kejelasan regulasi dan kepastian tata kelola di tengah berkembangnya inovasi digital di sektor keuangan.

Dari diskusi tersebut, AFTECH merumuskan beberapa langkah tindak lanjut termasuk: rencana untuk menyusun FAQ atas implementasi POJK untuk penyelenggara ITSK; serta audiensi dengan OJK IAKD.

AFTECH bermaksud untuk menyelenggarakan Members Gathering secara regular dalam rangka memperkuat dialog anggota guna mengoptimalkan layanan advokasi dan pengembangan komunitas dari asosiasi.

KEGIATAN ADVOKASI

AFTECH dan Bappenas Perkuat Kerjasama Implementasi Digital x Real Sector Launchpad



Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas menyepakati finalisasi nota kesepahaman (MoU) terkait inisiatif **Digital x Real Sector Launchpad** pada 25 Juli 2025. Rapat finalisasi dihadiri jajaran pengurus AFTECH antara lain: Wakil Ketua Umum I Marshall Pribadi, Wakil Ketua Umum V Bryan Silfanus, Sekretaris Jenderal Firlie Ganinduto, serta Wakil Sekretaris Jenderal I Chrisma Albandjar dan Wakil Sekretaris Jenderal IV Sati Rasuanto.

Ruang lingkup dari MoU meliputi pengembangan ekosistem digital yang terintegrasi dengan sektor riil, identifikasi program prioritas digitalisasi, uji coba dan *sandboxing* proyek inovasi, serta transformasi digital di sembilan sektor strategis: industri, pariwisata, ekonomi kreatif, investasi, pendidikan, kesehatan, pertanian, logistik, dan pemerintah digital.

Kolaborasi AFTECH dan Bappenas ini diharapkan dapat mendukung program Trisula Pembangunan, yaitu: percepatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penurunan kemiskinan, dan peningkatan kualitas SDM. AFTECH sendiri menekankan perannya dalam mendorong adopsi layanan ekonomi dan keuangan digital untuk membantu sektor riil memperluas akses, meningkatkan literasi, serta mendorong adopsi teknologi seperti melalui otomasi, IoT, serta AI.

Dengan kerjasama ini AFTECH dan Bappenas menargetkan lahirnya inovasi yang berdampak nyata bagi sektor riil, tidak hanya meningkatkan produktivitas dan inklusi keuangan, tetapi juga menopang pencapaian agenda besar RPJMN 2025–2029.

Informasi lebih lanjut terkait **Kegiatan Advokasi AFTECH dan Kegiatan Ke-24 Departemen** dapat diperoleh melalui email: policy@fintech.id

KEGIATAN EDUKASI LITERASI

AFTECH dan DepositoBPR by Komunal Dorong Inovasi PAJK untuk Perluas Akses Keuangan

Pemerataan akses layanan keuangan digital masih menjadi pekerjaan rumah besar di Indonesia. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menunjukkan, inklusi keuangan nasional memang meningkat, tetapi kesenjangan akses antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih lebar. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yang tersebar di daerah masih belum terhubung secara optimal dengan ekosistem digital yang dapat memudahkan masyarakat dalam mengakses produk-produk keuangan digital.

Guna menjawab tantangan ini, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bekerjasama dengan DepositoBPR by Komunal menyelenggarakan sesi pengenalan inovasi Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK) dalam bentuk Fintech Talk bertajuk "Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan: Harapan Baru Akselerasi Inklusi Keuangan" di Sampoerna Strategic Square, Jakarta, Rabu, 23 April 2025. Secara khusus, kegiatan ini menjelaskan bagaimana inovasi PAJK mampu menjembatani kebutuhan BPR dan memperluas jangkauan konsumen.

Wakil Ketua Umum III AFTECH, Angie Ariningsih, membuka kegiatan ini dengan menegaskan peran strategis PAJK. "Platform PAJK yang terintegrasi dengan BPR dapat membantu menjembatani kebutuhan masyarakat akan akses keuangan yang lebih mudah, aman, transparan, dan terjangkau." Karena relatif baru, maka edukasi dan literasi terkait inovasi PAJK masih perlu dilakukan secara regular dan seluas-luasnya.

Narasumber dari kegiatan ini adalah: Djoko Kurnijanto (Kepala Departemen Pengaturan dan Perizinan, IAKD Otoritas Jasa Keuangan (OJK)), Kendrick Winoto (Direktur Utama, Komunal Sejahtera Indonesia (KSI)), Murni Pandiangan (Direktur Utama, BPR Artatama), Lolita Setyawati, CFP, RIFA, QWP (Certified Financial Planner) serta Jimmy Ardianto (Sekretaris, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)). Fintech Talk, sebagai salah satu program rutin AFTECH, diharapkan dapat mendorong adopsi IITSK dan kolaborasi dengan pelaku usaha sektor jasa keuangan lainnya.



KEGIATAN EDUKASI LITERASI

AFTECH Dukung Percepatan Transformasi Digital di BPR/BPRS di Lampung: Partisipasi dalam Kegiatan Evaluasi Kinerja OJK Provinsi Lampung



Sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan transformasi digital di sektor keuangan, khususnya bagi BPR dan BPRS, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) menghadiri undangan untuk berpartisipasi dalam kegiatan “Evaluasi Kinerja dan Capacity Building BPR & BPRS Semester I Tahun 2025” yang diselenggarakan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung pada Selasa, 29 April 2025. Dalam kesempatan ini, AFTECH yang diwakili oleh Saat Priharto, Wakil Sekretaris Jenderal II, menegaskan komitmen asosiasi dalam memperkuat ekosistem keuangan daerah melalui pemanfaatan inovasi teknologi, termasuk Pemeringkat Kredit Alternatif (PAK).

AFTECH juga mensosialisasikan inovasi teknologi dalam model bisnis PAK, khususnya manfaatnya terhadap kecepatan dan analisa, yang dapat membantu BPR dan BPRS di Lampung dalam meningkatkan penyaluran pembiayaan – khususnya pembiayaan produktif bagi UMKM.

Partisipasi AFTECH dalam kegiatan ini merupakan wujud komitmen asosiasi dalam mendorong kolaborasi anggotanya dengan pelaku usaha jasa keuangan lainnya, khususnya di luar Jabodetabek.

KEGIATAN EDUKASI LITERASI

AFTECH Dukung Literasi Digital Keuangan di Sorong, Fokus Perluas Demografi Pengguna Fintech



Dengan semangat memperluas literasi keuangan digital dari Sabang sampai Merauke, AFTECH menghadiri undangan OJK untuk berpartisipasi dalam kegiatan di Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Papua Barat Daya, pada 28 Mei 2025. Kegiatan ini menjadi ajang sosialisasi seputar perkembangan fintech dan inklusi keuangan berbasis teknologi.

Wakil Sekretaris Jenderal I AFTECH, Chrisma Aryani Albandjar, menjadi salah satu pembicara dalam sesi panel diskusi. Selain mensosialisasikan perkembangan inovasi fintech saat ini dari manfaat dan risiko. Chrisma juga mengajak mahasiswa menjadi agen literasi keuangan digital, mengedukasi lingkungan sekitar, dan memanfaatkan peluang dari kemajuan teknologi keuangan yang inklusif serta bertanggung jawab.

Sorong sendiri dikenal sebagai pintu gerbang perdagangan dan logistik di Papua Barat Daya, dengan sektor perdagangan, konstruksi, dan pemerintahan sebagai penopang utama ekonominya. Di sisi digitalisasi, kota ini tengah mempercepat transformasi melalui penerapan layanan publik berbasis elektronik dan pelatihan digital bagi pelaku UMKM. Meski begitu, kesenjangan akses internet di wilayah sekitar masih menjadi tantangan.

Partisipasi dalam kegiatan edukasi literasi ini, merupakan wujud komitmen AFTECH dalam meratakan edukasi keuangan digital di seluruh Indonesia. Dari Sorong, AFTECH menyalakan semangat agar manfaat layanan fintech tidak hanya dinikmati konsumen di kota besar, tetapi juga masyarakat di wilayah timur dan pelosok Indonesia.



KEGIATAN EDUKASI LITERASI

Jaga Kepercayaan Digital, AFTECH Dorong Literasi dan Tanda Tangan Elektronik



Kasus penipuan digital makin membanjiri ruang daring Indonesia. Indonesia Anti Scam Center (IASC) telah menerima sejumlah besar laporan penipuan sejak peluncurannya pada akhir November 2024 hingga Juni 2025. Laporan dari CNBC Indonesia menyebutkan bahwa IASC menerima 166.258 laporan, dengan total kerugian mencapai Rp 3,4 triliun dan pemblokiran rekening mencapai 56.986. Selain penipuan digital (scam), tren kejahatan siber dan insiden kebocoran data terus meningkat di Indonesia. Menurut pemberitaan di media, di kuartal pertama tahun 2025, Indonesia menghadapi lebih dari 3 juta serangan siber, dengan ancaman yang terus berkembang termasuk serangan berbasis AI dan kerentanan pada teknologi baru dan lama. Hal ini membuat risiko keamanan digital, menjadi risiko kritis yang wajib diwaspadai oleh penyelenggara dan konsumen layanan digital, termasuk fintech.

Kesadaran akan risiko scam, pentingnya keamanan siber serta menjaga data pribadi menjadi kunci penting dalam menjawab tantangan diatas. Hal ini menjadi latar belakang yang mendorong Privy untuk bekerja sama dengan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) dalam menyelenggarakan kegiatan edukasi dan literasi dalam bentuk Media Clinic & KOL Gathering di Cibis Nine, Jakarta Selatan, pada 15 Mei 2025.



Kegiatan Media Clinic ini dibuka oleh Wakil Ketua Umum III AFTECH, Angie Ariningsih, yang menekankan bahwa menghadapi tantangan keamanan digital tidak hanya memerlukan kesadaran (awareness), tetapi juga inovasi. Salah satu bentuk inovasi tersebut adalah pemanfaatan teknologi seperti Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan Digital ID.

Sebanyak 25 Key Opinion Leader (KOL) dan 10 perwakilan media hadir dalam sesi yang menampilkan CEO Privy, Marshall Pribadi, bersama sejumlah narasumber. Mereka memaparkan layanan Tanda Tangan Elektronik (TTE) dan Digital ID, serta menjelaskan bagaimana inovasi ini dapat membantu mencegah kejahatan digital sekaligus meningkatkan perlindungan konsumen.

Kegiatan Media Clinic merupakan bagian dari program rutin AFTECH yang bertujuan untuk meningkatkan literasi media seputar perkembangan inovasi dan teknologi di sektor jasa keuangan.



Informasi lebih lanjut terkait **AFTECH Media Clinic** dapat diperoleh melalui
email: marcomm@fintech.id

KEGIATAN EDUKASI LITERASI

Menjembatani Akses dan Menutup Kesenjangan Literasi Keuangan Digital di Timur Indonesia: INFINITY Goes to Kampus Universitas Hasanuddin



Provinsi Sulawesi Selatan merupakan salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di timur Indonesia. Provinsi ini mencatat pertumbuhan ekonomi 5,78% (YoY) di kuartal I 2025 yang bersumber dari sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan sekaligus ekspor jasa dan barang. Dari sisi kesiapan digitalisasi, Sulawesi Selatan memiliki tingkat penetrasi internet sebesar 71,81% di tahun 2024 menurut survei APJII. Angka inklusi keuangan juga cukup tinggi yaitu mencapai 88,57%, namun literasi keuangan masih tertinggal di angka 36,88% (Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan/SNLIK 2022).

Profil provinsi Sulawesi Selatan, khususnya keberadaan gap antara inklusi dan literasi keuangan yang ada, menjadi latar belakang yang mendorong AFTECH untuk menyelenggarakan program INFINITY Goes to Campus 2025. Kegiatan ini didukung oleh OJK Regional Sulawesi Selatan, Bank Indonesia, dan anggota AFTECH yaitu: Easy Cash, GORO dan Artaku. serta dihadiri oleh lebih dari 100 mahasiswa/i serta diselenggarakan di Arsjad Rasjid Lecture Hall, Universitas Hasanuddin, Makassar pada tanggal 3 Juni 2025.

Kepala OJK Sulawesi Selatan, Moch. Muchlasin, mendorong mahasiswa/i yang hadir untuk semakin memahami manfaat, risiko serta hak mereka sebagai konsumen layanan keuangan digital. Sementara itu Wakil Sekretaris Jenderal I AFTECH, Chrisma Albandjar, konsisten mengajak generasi muda untuk menjadi agen literasi keuangan digital. Beliau menambahkan bahwa literasi adalah fondasi penting bagi ekosistem keuangan digital yang sehat di Indonesia.

Kegiatan INFINITY Goes to Campus merupakan bagian dari program edukasi dan literasi rutin AFTECH yang menargetkan generasi muda, khususnya mahasiswa/i di seluruh Indonesia. Pada kegiatan di Makassar, berbagai topik terkini di dunia fintech turut dibicarakan, termasuk: pinjaman online ilegal, investasi bodong, dan judi online. AFTECH juga tidak lupa mensosialisasikan kampanye #GenerasiHebatAntiJudol.

Melalui program INFINITY Goes to Campus, AFTECH berharap dapat mendorong akselerasi masyarakat cerdas finansial di Indonesia. INFINITY Goes to Campus juga dirancang untuk mendorong perluasan dan pemerataan demografi pengguna fintech di seluruh Indonesia, sehingga manfaat teknologi keuangan dapat dirasakan merata dan menopang pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.



KEGIATAN EDUKASI LITERASI

PAK dan PAJK: Layanan Fintech Pendukung Transformasi Digital Lembaga Jasa Keuangan



Transformasi digital lembaga jasa keuangan di era digital tak lagi sekadar soal membuat sebuah layanan menjadi dapat diakses secara digital, namun merujuk pada digitalisasi yang berbasis nilai-nilai tambah berikut: inovasi berbasis *consumer experience*, keamanan, dan efisiensi. Beberapa model bisnis fintech yang menawarkan inovasi dan mendukung transformasi digital lembaga jasa keuangan adalah Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK).

PKA menjadi menjadi model bisnis yang disoroti dalam forum Evaluasi Kinerja dan Capacity Building Lembaga Jasa Keuangan yang digelar OJK Provinsi Kalimantan Barat pada 23 Juni 2025 di Pontianak. Mengangkat tema "Penggunaan Innovative Credit Scoring (ICS) sebagai salah satu alternatif parameter dalam pembiayaan dan Agregasi Keuangan sebagai Salah Satu Solusi Pengembangan LJK", kegiatan ini dihadiri oleh perwakilan industri jasa keuangan setempat, pejabat OJK, dan pemangku kepentingan terkait.

AFTECH berpartisipasi dalam kegiatan ini dan diwakili oleh Wakil Sekretaris Jenderal II, Saat Prihartono. Dalam sesi pemaparan dan diskusi, AFTECH menekankan bahwa PKA dan PAJK tidak hanya menyediakan alat ukur risiko pinjaman, namun juga menjalankan fungsi sebagai jembatan yang menghubungkan layanan keuangan dengan masyarakat yang selama ini belum terlayani (*underserved*). Dengan memanfaatkan data alternatif dan teknologi analitik terkini, PKA diyakini dapat memperluas akses kredit, terutama bagi pelaku usaha kecil dan masyarakat berpenghasilan rendah, sekaligus memperkuat efisiensi proses analisis lembaga jasa keuangan.

Kolaborasi antara regulator dan industri dalam mengembangkan PKA dan PAJK menegaskan komitmen AFTECH mendorong inovasi yang inklusif dan berkelanjutan. Bagi AFTECH, pemanfaatan inovasi teknologi adalah strategi wajib guna memastikan ekosistem keuangan nasional tumbuh lebih tangguh, aman, dan berdaya saing tinggi.



KEGIATAN EDUKASI LITERASI

AFTECH Mendorong Generasi Melek Fintech Lintas Batas

Di era ekonomi digital yang bergerak cepat, literasi keuangan kini menentukan seberapa kuat masyarakat menyambut gelombang inovasi. Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2025 mencatat literasi keuangan naik ke 66,46 % (meningkat dari 65,43 % pada 2024) sementara inklusi keuangan naik pesat ke 80,51 %, naik dari 75,02 % di tahun sebelumnya.

Dalam upaya memperkuat literasi dan memperluas jangkauan edukasi fintech, AFTECH bekerja sama dengan Cyber University dan Universiti Teknologi Petronas (UTP) kembali menggelar kegiatan *INFINITY Goes to Campus*. Dibuka oleh Wakil Ketua Umum II AFTECH, Saat Prihartono, kegiatan ini juga menghadirkan panel diskusi yang membahas perkembangan fintech di Indonesia serta berbagai interactive games, kegiatan ini didukung oleh 3 anggota AFTECH yaity: Indodax, ESPAY, dan GajiGesa. Selain memberikan penjelasan akan model bisnis fintech-nya masing-masing, anggota AFTECH juga membagikan wawasan kepada kurang lebih 40 mahasiswa/i akan manfaat dan risiko yang mesti diperhatikan sebelum menggunakan layanan fintech.

Delegasi dari Cyber University dan UTP juga diajak melihat langsung bagaimana kegiatan operasional sebuah perusahaan fintech melalui kunjungan (*site visit*) ke kantor Easycash. Diharapkan kegiatan ini mendorong pemahaman mahasiswa/i akan layanan fintech dan membangun kesadaran mereka akan risiko-risiko penting seperti *scam*, kejahatan siber, dan juga kebocoran data pribadi.

INFINITY Goes to Campus merupakan program reguler AFTECH yang menargetkan generasi muda, khususnya mahasiswa/i, di seluruh Indonesia. Saat ini AFTECH telah bermitra dengan seluruh universitas dalam rangka mengimplementasikan program ini, dan terus berupaya meningkatkan jumlah kemitraan dengan universitas.



KEGIATAN EDUKASI LITERASI

Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Fintech: Partisipasi AFTECH dalam OJK In House Training Batch 2



Pada tanggal 1 Juli 2025, AFTECH memenuhi undangan OJK sebagai narasumber dalam kegiatan In House Training (IHT) OJK Batch 2 yang mengangkat tema "Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Akses Keuangan dalam Ekosistem Closed Loop" dan digelar di Kantor OJK Provinsi Sumatera Selatan, Palembang. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peserta terkait strategi penguatan ekonomi daerah lewat akses keuangan yang lebih luas dan terintegrasi.

Hadir mewakili AFTECH, Sekretaris Jenderal Firli Ganinduto, menyampaikan dalam paparannya bagaimana teknologi keuangan dapat menjadi katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah. Contohnya melalui pemanfaatan layanan Pemeringkat Kredit Alternatif (PKA) dan Penyelenggara Agregasi Jasa Keuangan (PAJK) yang memfasilitasi penyaluran pembiayaan bagi sektor riil. Inovasi layanan keuangan digital ini memberi ruang bagi pelaku usaha daerah untuk mengembangkan potensi unggulan mereka, sekaligus menghadirkan manfaat ekonomi langsung bagi masyarakat.

Kegiatan IHT ini diikuti oleh lebih dari 40 peserta aktif dari berbagai kalangan. Selama tiga hari, para peserta IHT diajak menggali strategi memperkuat ekosistem keuangan daerah dengan model closed loop, sebuah pendekatan berbasis kemitraan terpadu antara pemerintah, lembaga jasa keuangan, pelaku usaha, akademisi, dan offtaker.

Melalui partisipasi dalam kegiatan ini, AFTECH tidak hanya berbagi pengetahuan dengan peserta, namun juga menjalankan peran asosiasi sebagai mitra strategis bagi regulator dan pemangku kepentingan daerah. Dengan demikian, AFTECH semakin solid menempatkan diri sebagai jembatan antara inovasi finansial dan perkembangan sektor riil guna mendukung terciptanya pembangunan ekonomi yang berkelanjutan.

Untuk pertanyaan seputar **kegiatan edukasi dan literasi AFTECH** dapat dikirimkan melalui email ke: marcomm@fintech.id

KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS KOMUNITAS

Perdana AFTECH International Business Desk: Perkuat Jembatan Fintech Indonesia–Singapura



Data Kementerian Perdagangan mencatat, Singapura merupakan salah satu mitra dagang terbesar Indonesia sekaligus sumber investasi asing langsung terbesar dalam satu dekade terakhir. Di sektor teknologi keuangan, kedua negara aktif bertukar pengetahuan, mengembangkan inovasi, dan membuka pasar lintas batas. Nilai transaksi ekonomi digital ASEAN sendiri diproyeksikan menembus US\$1 triliun pada 2030, dengan Indonesia dan Singapura sebagai dua motor utama.

Dalam konteks itulah, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) mendukung penuh SFA Business Mission Trip Jakarta, 5–9 Mei 2025. Kunjungan bisnis ini diikuti oleh 26 delegasi dari 19 perusahaan anggota Singapore Fintech Association (SFA) yang dipimpin oleh CEO SFA, Reuben Lim. Selama lima hari, mereka menjajaki peluang kolaborasi, memahami regulasi, dan memperluas jejaring dengan ekosistem digital di Tanah Air.

Program ini menjadi tonggak penting bagi AFTECH: layanan "International Business Desk AFTECH" perdana yang dinilai sukses oleh SFA. Sepanjang kunjungan ke Jakarta, AFTECH memfasilitasi 17 pertemuan strategis antara delegasi SFA dengan 23 institusi dalam ekosistem keuangan digital Indonesia - mulai dari regulator seperti Bank Indonesia dan OJK, asosiasi industri seperti PERBANAS, anggota AFTECH, termasuk: CIMB Niaga, Bank Jago, Bank Sahabat Sampoerna, CLIK, MNC Life, MotionPay, MotionBank, BNI, DOKU, dan GoTo Financial; serta perusahaan dalam ekosistem keuangan lainnya seperti: Bank DKI, Bahana TCW Investment Management, dan Amar Bank. Selain networking, anggota AFTECH berkesempatan untuk melakukan diskusi dengan delegasi SFA atas topik-topik seperti: transformasi digital perbankan, peluang kolaborasi di payment, kecerdasan buatan, blockchain, serta pengembangan pasar lintas negara.

Rangkaian kegiatan SFA Business Mission Trip ditutup dengan *networking dinner* di Jakarta, 9 Mei, yang diisi dihadiri oleh perwakilan Dewan Pengurus Harian dan Dewan Etik AFTECH.

Informasi lebih lanjut terkait **AFTECH International Business Desk** dapat diperoleh melalui email: marcomm@fintech.id

KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS KOMUNITAS

Memperkuat Sinergi Asuransi Digital, AFTECH Selenggarakan Insurtech Networking Dinner & FGD



Permintaan terhadap layanan asuransi digital di Indonesia diproyeksikan terus melesat. Di kawasan Asia-Pasifik, pasar insurtech diperkirakan mencapai USD 20,8 miliar pada 2025 dan melesat menjadi USD 52,5 miliar pada 2030, dengan pertumbuhan CAGR sekitar 20,3% (mordorintelligence.com). Angka ini menggambarkan peluang besar bagi inovasi asuransi digital, namun juga menyoroti kebutuhan atas kerangka regulasi yang adaptif dan inklusif.

Meresponi momentum tersebut, AFTECH sebagai bagian dari Program Kerja Wakil Ketua Umum V, Bryan Silfanus, menyelenggarakan *Insurtech Networking Dinner & FGD* pada 20 Mei 2025 di Jakarta. Acara yang dihadiri oleh 15 perusahaan Insurtech di Indonesia diharapkan dapat meningkatkan partisipasi penyelenggara Insurtech di AFTECH, sekaligus menjaring masukan untuk program kerja Departemen-Departemen terkait Insurtech selama periode 2025-2029.

Selain kerangka regulasi yang perlu didorong untuk menjadi lebih kondusif, talenta digital, serta kebutuhan akan data industri Insurtech merupakan beberapa isu advokasi prioritas bagi Departemen-Departemen Insurtech. Tindak lanjut dari hasil FGD dan networking ini termasuk: audiensi kepada OJK, serta penyelenggaraan workshop bersama regulator untuk menyamakan definisi, menyelaraskan praktik bisnis, dan mengharmonisasi regulasi.

Kegiatan *Insurtech Networking Dinner & FGD* ini mengawali implementasi Program Kerja Wakil Ketua Umum V. AFTECH berkomitmen untuk mendukung perkembangan dan penguatan model bisnis Insurtech di Indonesia.



KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS KOMUNITAS

AFTECH Expert Lab bersama Oradian: Menyambut Lanskap Ekosistem Keuangan Masa Depan



Pengguna layanan keuangan digital di Indonesia jumlahnya terus bertambah pesat, contohnya pada sistem pembayaran. Di kuartal II 2025, volume transaksi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) tumbuh sebesar 148,5% secara tahunan atau year-on-year (y-o-y), sementara nominal transaksi QRIS mencapai Rp 317 triliun dengan jumlah pengguna mencapai 57 juta. Angka ini bukan sekadar statistik: ia menggambarkan perubahan perilaku masyarakat yang makin akrab dengan dompet digital, transaksi nirsentuh, dan layanan berbasis aplikasi.

Namun di balik angka pertumbuhan yang fantastis, ada tantangan yang tak kalah besar yang dihadapi penyelenggara jasa sistem pembayaran di Indonesia. Sistem harus aman, terintegrasi, dan patuh regulasi agar menjadi fondasi industri yang kokoh dan efektif memenuhi kebutuhan konsumen. Kolaborasi menjadi salah satu jawaban terhadap tantangan industri ini.



Dengan latar belakang perkembangan tersebut, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bekerjasama dengan Oradian, penyedia software core banking berbasis cloud, menggelar **Expert Lab** yang mengangkat tema *“Scaling Smart: Building a Connected, Compliant, and Future-Ready Financial Ecosystem”*. Kegiatan workshop yang diselenggarakan pada tanggal 11 Juni 2025 di Alila SCBD ini mempertemukan sekitar 35 perwakilan regulator, bank, penyeleggera fintech dan teknologi

(Bersambung ke halaman berikutnya)

anggota AFTECH, dan membahas strategi untuk memperluas layanan keuangan digital yang patuh regulasi, mendorong kolaborasi bank – fintech - multifinance, serta membekali partisipan dengan wawasan praktis menghadapi tantangan infrastruktur dan inovasi berkelanjutan.

Terkait dengan kegiatan ini, Wakil Sekretaris Jenderal II, Saat Prihartono, menyampaikan bahwa "Kolaborasi antar lembaga keuangan kini lebih penting dari sebelumnya. Saat ini AFTECH aktif membangun kemitraan dengan pihak lokal maupun internasional. Kami menyambut baik kerjasama dengan Oradian sebagai salah satu anggota internasional pertama AFTECH dalam hal ini."

Selain mendiskusikan aspek manfaat dan layanan cloud bagi sektor jasa keuangan, kegiatan workshop ini juga mendiskusikan kunci sukses transformasi digital dalam lembaga jasa keuangan serta kebutuhan infrastruktur untuk masa depan layanan keuangan digital di Indonesia.

Gelombang digital sudah terlanjur datang. Pertanyaannya, siapa yang siap berselancar di atasnya dengan aman? AFTECH konsisten mempersiapkan anggotanya menghadapi gelombang inovasi melalui berbagai program rutin, termasuk Expert Lab yang berbentuk workshop profesional.



Informasi lebih lanjut terkait **AFTECH Expert Lab** dapat diperoleh melalui
email: marcomm@fintech.id



KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS KOMUNITAS

Fintech Masuk Kandang Sapi: AFTECH, ILO, dan OJK Dorong Digitalisasi Peternak Sapi Perah di Malang



Sebagai wujud komitmen mendorong inklusi keuangan digital di sektor riil, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) bersama International Labour Organization (ILO) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melakukan kunjungan lapangan ke Koperasi Agro Niaga Jabung (KAN Jabung), Malang, Jawa Timur, 10 Juli 2025.

Kegiatan ini dihadiri Wakil Sekretaris Jenderal II AFTECH, Saat Prihartono, bersama anggota AFTECH Lendana dan Aiforsee. Dari sisi regulator, hadir pula OJK dan mitra koperasi, termasuk BPRS Al Hijrah Thayiba.

Fokus kegiatan adalah membahas kolaborasi dalam rangka percepatan digitalisasi sektor peternakan sapi perah. AFTECH dan ILO juga mendiskusikan integrasi sistem Enterprise Resource Planning (ERP) dengan layanan keuangan digital. Integrasi ini diharapkan akan menghubungkan data produksi susu dan aktivitas koperasi dengan penyedia layanan jasa keuangan, sehingga dapat mendorong kemudahan bagi peternak dalam memperoleh pembiayaan.

Selain berdiskusi dengan pengurus KAN Jabung dan BPRS Al Hijrah Thayiba untuk memetakan tantangan akses pembiayaan anggota koperasi, perwakilan AFTECH juga meninjau langsung Milk Collection Point serta peternakan anggota guna memahami kebutuhan peternak dari hulu ke hilir.

AFTECH menekankan bahwa integrasi digital ini bukan semata uji coba teknologi. "Kolaborasi sektor digital dengan sektor riil adalah jalan untuk menghadirkan akses keuangan yang benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," ujar Saat Prihartono di sela kegiatan.

Kunjungan ini merupakan bagian dari fase kedua program PROMISE IMPACT, yang menargetkan peningkatan akses pembiayaan UMKM melalui inovasi digital. Sementara bagi AFTECH, kolaborasi ini adalah merupakan wujud nyata peran asosiasi sebagai katalis pertumbuhan ekonomi daerah, mulai dari koperasi kecil hingga industri skala nasional.

KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS KOMUNITAS

Perkuat Kapasitas CTO dan CIO: Pelindungan Konsumen Digital Lewat Adopsi AI Untuk Keamanan Siber



Pesatnya digitalisasi di berbagai sektor saat ini diikuti dengan meningkatnya risiko digital, termasuk kejahatan siber. Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat sebanyak 3,64 miliar serangan siber terjadi di Indonesia sepanjang paruh pertama 2025. Angka ini lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sektor keuangan menjadi salah satu target utama, dengan bentuk serangan mulai dari *Distributed Denial of Service (DDoS)*, malware polymorphic, hingga pengambilalihan identitas digital.

Bagi penyelenggara fintech, serangan keamanan siber tidak hanya menimbulkan risiko gangguan kegiatan operasional, namun juga dapat menurunkan kepercayaan seluruh pemangku kepentingan atas layanan keuangan digital. Untuk itu perusahaan baik di dalam maupun luar negeri telah mulai menerapkan AI dan otomasi dalam menjaga keamanan siber.

Perkembangan ini menjadi latar belakang bagi AFTECH untuk bekerjasama dengan Amazon Web Services (AWS) dan menyelenggarakan kegiatan CTO/CIO Connect 2025, sebagai bagian dari program pengembangan profesional bagi anggota AFTECH. Kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 16 Juli 2025 ini dihadiri oleh lebih dari profesional IT senior dari perusahaan anggota AFTECH dan mengangkat tema "*AI in Cybersecurity: Effective Solutions to Face Complex Cyber Threats in Fintech Industry*".

Wakil Ketua Umum VII AFTECH, Haryati Lawidjaja, membuka kegiatan ini dan menyampaikan dalam sambutannya bahwa peran CTO dan CIO kini telah melampaui urusan teknis. Mereka dituntut menjamin keberlanjutan solusi, kepatuhan regulasi, sekaligus menjaga ketahanan siber.

Dalam kegiatan ini, Alexander Sabar, Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, juga menyampaikan tiga fokus utama dari pemerintah terkait dengan pengembangan adopsi AI termasuk untuk meningkatkan keamanan siber: tata kelola dan etika AI, integrasi lintas sistem, serta kesiapan talenta. Indonesia bahkan menyiapkan AI Center of Excellence sebagai pusat pengembangan ekosistem nasional.

CTO/CIO Connect melainkan bagian dari lima program komunitas profesional yang saat sedang dijalankan oleh asosiasi. Program komunitas profesional AFTECH bertujuan untuk memperkuat peran para pemimpin teknologi, berbagi praktik terbaik, sekaligus menjalin kolaborasi lintas sektor. Anggota AFTECH yang ingin bergabung dipersilakan untuk menjadi bagian dari komunitas ini.



Informasi lebih lanjut terkait **Program Komunitas Profesional AFTECH** dapat diperoleh melalui email: marcomm@fintech.id

KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS KOMUNITAS

Partisipasi AFTECH dalam *WE Finance Code*: Dorong Realisasi Potensi Pengusaha Perempuan Melalui Layanan Keuangan Digital



Perempuan wirausaha memainkan peran penting dalam menggerakkan ekonomi nasional. Menurut statistik 64,5% UMKM di Indonesia atau sekitar 42,3 juta dimiliki oleh perempuan. Namun, keterbatasan akses pembiayaan dan layanan keuangan, pada saat ini menjadi tantangan usaha bagi perempuan wirausaha untuk mengoptimalkan potensi ekonominya. Sebagai referensi, menurut studi IFC pada tahun 2016 kesenjangan pendanaan wirausaha perempuan di Indonesia mencapai USD 11 miliar. Saat ini angka tersebut diperkirakan telah melonjak menjadi USD 25 miliar.

Menjawab persoalan itu, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) diwakili oleh Wakil Ketua Umum VI, Risye Dillianti bersama para pemangku kepentingan lintas sektor resmi menandatangani *National Adoption of Women Entrepreneurs Finance Code* (*WE Finance Code*) di Hotel Fairmont, Jakarta, 22 Juli 2025.

Acara yang diinisiasi Kementerian Keuangan sebagai co-champion ini mempertemukan kementerian dan lembaga negara, perbankan, perusahaan fintech, lembaga keuangan mikro, asosiasi, hingga organisasi perempuan. Agenda utamanya: memperkuat kolaborasi untuk memperluas pembiayaan dan layanan keuangan bagi pelaku usaha perempuan.

WE Finance Code merupakan komitmen global lintas sektor yang bertujuan menutup kesenjangan pembiayaan bagi perempuan wirausaha dengan tiga pendekatan utama: kepemimpinan, aksi, dan data. Pertama, mendorong setiap lembaga memiliki champion di tingkat pimpinan untuk mengarusutamakan kebijakan ramah gender. Kedua, memperluas produk dan layanan keuangan yang lebih inklusif, mulai dari kredit, pembiayaan syariah, hingga layanan non-finansial seperti pelatihan dan mentoring. Ketiga, mengarusutamakan pengumpulan data terpisah gender agar keputusan pembiayaan lebih berbasis bukti.

Melalui penandatanganan komitmen terhadap *WE Finance Code*, AFTECH berharap mampu mendukung pengembangan layanan keuangan digital yang lebih sesuai dengan kebutuhan perempuan, meningkatkan literasi keuangan, sekaligus menciptakan data yang transparan untuk mengukur kemajuan. Kolaborasi ini diyakini dapat memperkuat daya saing UMKM perempuan dan pada akhirnya berkontribusi bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan.



KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS KOMUNITAS

Seri Training Profesional AFTECH & LPPI: SDM Fintech Kuat Bagi Layanan Keuangan Digital yang Berintegritas



AFTECH bersama Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) sepanjang Juni hingga Juli 2025 menyelenggarakan serangkaian pelatihan untuk memperkuat tata kelola, kepatuhan, dan manajemen risiko di industri fintech. Empat program yang digelar berhasil menarik lebih dari 30 peserta dari berbagai perusahaan fintech.

Pelatihan perdana bertajuk "*Compliance Risk for Fintech*" digelar 17–18 Juni 2025, berfokus pada strategi mitigasi risiko kepatuhan, mulai dari identifikasi risiko hingga pembangunan budaya kepatuhan. Disusul pelatihan "*APU PPT for Fintech*" pada 1–2 Juli 2025, yang mengupas prinsip anti pencucian uang, pencegahan pendanaan terorisme, hingga senjata pemusnah massal.

Ancaman lain yang kerap membayangi sektor keuangan digital dibahas dalam pelatihan "*Anti-Fraud and Online Gambling for Fintech*" pada 10 Juli 2025. Program ini memperkenalkan teknik deteksi dini penipuan, strategi respons, serta pemahaman regulasi dari OJK dan PPATK. Rangkaian seri pelatihan ditutup dengan topik "*GCG for Fintech*" pada 17 Juli 2025, yang menekankan penerapan *Good Corporate Governance* sebagai fondasi keberlanjutan bisnis fintech.

Kedepannya kolaborasi AFTECH dan LPPI akan berlanjut melalui pelatihan-pelatihan baru. Harapannya, praktik terbaik tata kelola, kepatuhan, dan manajemen risiko semakin mengakar, sehingga industri fintech Indonesia mampu tumbuh sehat, inklusif, dan berdaya saing.

KEGIATAN PENGUATAN KAPASITAS KOMUNITAS

Rapat Perdana Dewan Etik AFTECH: Menjaga Tata Kelola, Merawat Kepercayaan Terhadap Industri Fintech



Dewan Kehormatan/Etik AFTECH menggelar rapat perdana pada Kamis, 10 April 2025. Pertemuan ini menjadi tindak lanjut setelah para anggota resmi terpilih dalam Rapat Umum Anggota AFTECH pada 21 Maret lalu. Agenda rapat difokuskan pada perumusan mekanisme kerja dewan serta penyamaan persepsi mengenai ruang lingkup kewenangan mereka.

Dewan Etik dipimpin oleh Harun Reksodiputro. Anggotanya berasal dari lintas disiplin: Alison Jap, Wemmy Muharamsyah, Pratama Persadha, Krishna Chandra, Yudho Giri Sucahyo, dan Bernardus Billy. Keberagaman latar belakang tersebut diharapkan membuat penegakan kode etik lebih komprehensif dan mencakup berbagai aspek industri.

Dalam rapat yang juga dihadiri perwakilan Sekretariat AFTECH, Dewan Etik membahas alur kerja yang akan dijalankan. Proses dimulai dari pengumpulan informasi dan laporan oleh sekretariat, dilanjutkan analisis awal, hingga pemanggilan hearing apabila diperlukan. Seluruh tahapan bermuara pada mekanisme pemberian rekomendasi atau sanksi sesuai AD/ART. Dewan menegaskan bahwa proporsionalitas menjadi prinsip utama, dengan sanksi ditempatkan sebagai opsi terakhir setelah upaya pembinaan. Mekanisme ini sejalan dengan Standard Operating Procedures (SOP) yang telah diadopsi AFTECH.

Dewan Etik juga menyepakati batas yurisdiksi mereka: kewenangan hanya berlaku bagi anggota AFTECH. Dengan demikian, laporan atau sengketa yang melibatkan pihak di luar keanggotaan tidak berada dalam lingkup penanganan mereka. Mekanisme ini, kata Dewan, harus berjalan jelas, adil, dan sesuai mandat organisasi.

Lewat rapat perdana ini, AFTECH menegaskan komitmen membangun tata kelola industri yang sehat. Kehadiran Dewan Etik diharapkan bukan hanya menjaga disiplin internal, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap ekosistem fintech Indonesia.



LIPUTAN KHUSUS: KOLABORASI SEKTOR RIIL DAN EKOSISTEM DIGITAL

Mewujudkan Mimpi MBR Punya Hunian Layak Huni: Sinergi Inovasi, Data, dan Regulasi

Program 3 Juta Rumah untuk menghadirkan hunian layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) merupakan salah satu program penting di era Presiden Prabowo Subianto. Badan Pusat Statistik mencatat, per Maret 2025 jumlah penduduk miskin mencapai 23,85 juta jiwa, atau sekitar 8,47% dari total populasi. Disisi lain, menurut data Susenas BPS 2023, backlog kepemilikan rumah nasional masih mencapai 9,9 juta unit, dan menyentuh 12,7 juta unit menurut data kompilasi dari DPR RI melalui LPEM FEB UI. Pada 2023, pemerintah membangun 1.217.794 unit rumah, di mana hampir 83% diperuntukkan bagi MBR. Salah satu tantangan utama penyediaan hunian layak huni bagi MBR adalah keterbatasan akses pembiayaan.

Pada 10 Juni 2025, AFTECH menghadiri pertemuan strategis antara Kemenko Infrastruktur, OJK, beberapa anggota AFTECH, termasuk Grab dan OVO, AIForesee, Trusting Social, Scoring Technology, Prime Analytics, dan Bangun Persada Sosial (BPS). Tujuannya jelas mendiskusikan rancangan desain dan mekanisme pembiayaan perumahan bagi MBR melalui pemanfaatan data alternatif dan kolaborasi antar-regulator dan sektor swasta. Diharapkan kolaborasi dengan penyelenggara fintech dapat menjawab tantangan penilaian kredit bagi MBR dan menciptakan sistem penjaminan risiko yang lebih inklusif dan akurat, sehingga dapat mendorong penyaluran pembiayaan perumahan bagi MBR secara efektif.



Sinergi Kebijakan Bagi Pemanfaatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan Yang Bertanggungjawab dan Efektif Dalam Menjawab Tantangan Sektor Riil

Pemerintah menyadari pentingnya peran inovasi teknologi sebagai enabler penting untuk mendorong produktivitas sektor riil sekaligus implementasi proyek strategis nasional. Untuk itu pemerintah juga mempersiapkan diri dengan semakin memperkuat basis data dan akuntabilitas. Pada 30 Juli 2025, Kementerian PKP bersama Mendagri dan BPS menyepakati kolaborasi dalam Pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSN). Ini memungkinkan sistem monitoring real-time terhadap progres pembangunan rumah, termasuk penyerahan subsidi, melalui dashboard bersama berbasis sistem antar-lembaga.

Sejalan dengan pemerintah, AFTECH sebagai bagian dari dunia usaha di ekosistem ekonomi dan keuangan digital menyadari pentingnya inovasi teknologi sebagai penggerak pembangunan sektor riil. Dalam rangka meningkatkan kontribusi dan menjaga relevansi, AFTECH telah merevisi AD/ART di Rapat Umum Anggota tanggal 21 Maret 2025 dengan menambahkan misi mendorong inovasi teknologi di sektor riil. Komitmen itu dipertegas melalui peluncuran inisiatif Digital x Real Sector Launchpad pada 4 Juli 2025.

Sehubungan dengan kolaborasi digital dan sektor riil pada program nasional 3 juta rumah, AFTECH akan terus berkomitmen mendukung Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan serta OJK. Dalam internal organisasi, salah satu program kerja AFTECH adalah membentuk Gugus Tugas (Task Force) lintas sektor guna membahas mekanisme teknis (termasuk terkait pertukaran data sesuai peraturan perundang-undangan) penilaian kredit bagi MBR yang terhubung dengan perbankan. Program kolaborasi ini menjadi awal untuk menciptaan akses pembiayaan bagi jutaan keluarga berpenghasilan rendah sehingga mereka dapat mewujudkan impian sederhana: memiliki rumah sendiri yang layak huni.





Regulatory Compliance System (RCS) AFTECH dan HukumOnline: Langkah Nyata Mendorong Implementasi Kode Etik Asosiasi dan Tata Kelola Industri yang Baik

Di era ekonomi digital, kepercayaan adalah mata uang yang paling berharga. Namun, derasnya arus teknologi juga menghadirkan ancaman serius: kebocoran data pribadi. Indonesia bahkan kini masuk jajaran sepuluh besar negara dengan kasus kebocoran data terbanyak di dunia. Data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) mencatat, jumlah kasus melonjak dari 35 pada 2023 menjadi 111 kasus pada 2024.

Ancaman itu bukan sekadar soal teknis. Ia menyentuh jantung kepercayaan publik terhadap layanan keuangan digital. Bagi ekosistem fintech, menjaga data sama artinya menjaga keberlangsungan bisnis. Menjawab tantangan ini, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) berkolaborasi dengan Hukumonline meluncurkan Regulatory Compliance System (RCS), sebuah platform penilaian mandiri atas kepatuhan terhadap 7 Kode Etik AFTECH, Undang-



Undang Pelindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Sebagai mitra, Hukumonline sendiri telah mengembangkan sistem kepatuhan digital yang lengkap dan komprehensif bagi kliennya.

Forum sosialisasi RCS dan Pedoman Pelindungan Data Pribadi digelar pada 26 Juni 2025 di kantor Allen & Overy Jakarta. Kegiatan ini dibuka oleh Ketua Dewan Etik AFTECH, Harun Reksodiputro, dan dihadiri Sekretaris Jenderal AFTECH, Firlie Ganinduto. Lebih dari 100 peserta (baik luring maupun daring), termasuk regulator dari OJK, Bank Indonesia, dan Komdigi, turut hadir membahas urgensi perlindungan data di era ekonomi digital.

"Perlindungan data pribadi bukan hanya kewajiban hukum, melainkan fondasi dari kepercayaan. Tanpa itu, ekosistem digital akan rapuh," ujar Harun. Ia menekankan, kehadiran RCS adalah bukti nyata komitmen industri membangun tata kelola yang transparan dan bertanggung jawab.

COO Hukumonline, Jan Ramos Pandia, menambahkan, RCS mempermudah anggota dalam menavigasi lanskap regulasi yang semakin kompleks, sekaligus meminimalkan risiko terlewatnya kewajiban penting. Kehadiran regulator di forum ini, lanjutnya, mempertegas bahwa perlindungan data adalah agenda lintas otoritas.

"RCS, penguatan pedoman tata kelola, dan pembentukan Risk Community AFTECH adalah komitmen nyata kami membangun ekosistem yang inovatif, aman, dan berkelanjutan," ujar Firlie dalam *closing remarks*.

Bagi AFTECH, perlindungan data bukan sekadar kepatuhan. Dengan RCS dan pedoman PDP, AFTECH menunjukkan bahwa kepatuhan adalah fondasi kepercayaan publik—prasyarat pertumbuhan ekosistem keuangan digital yang sehat, tangguh, dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Karena itu, AFTECH mengajak seluruh anggotanya untuk dapat memanfaatkan RCS secara optimal sebagai alat ukur kepatuhan terhadap Kode Etik AFTECH, UU PDP, dan UU ITE, demi memastikan tata kelola yang lebih kuat dan berkelanjutan.





LIPUTAN KHUSUS: SEKTOR RIIL



Kerjasama AFTECH & Bappenas: Inovasi Digital sebagai Enabler Efektif bagi Pertumbuhan Sektor Riil

Transformasi digital dalam RPJMN 2025–2029 ditempatkan inovasi teknologi bukan sekadar pelengkap, melainkan mesin utama pembangunan. Pemerintah menargetkan inovasi digital merambah sektor riil: dari industrialisasi, UMKM, hingga pertanian, seraya mendorong ekonomi hijau dan biru berbasis data. Di sisi lain, investasi besar dipatok pada pencetakan talenta digital lewat pendidikan vokasi dan kolaborasi industri. Semua itu dipayungi regulasi yang menjamin perlindungan konsumen dan kepercayaan publik, menjadikan inovasi digital bukan jargon, melainkan fondasi pertumbuhan ekonomi Indonesia lima tahun ke depan.



Menyikapi hal ini, Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) dan Kementerian PPN/Bappenas bekerjasama menggelar Forum Ekonomi & Keuangan Digital 2025 yang mengangkat tema “Dari Strategi ke Eksekusi: Transformasi Digital Nasional dan Sinergi Ekosistem Usaha Menuju Pertumbuhan Ekonomi 8%”. Kegiatan yang mengundang asosiasi industri dalam ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Indonesia ini diselenggarakan pada tanggal 4 Juli 2025 di Wisma Danantara dan dihadiri oleh perwakilan senior dari > 40 asosiasi industri.

Dalam sambutannya, Menteri PPN/Kepala Bappenas, Rachmat Pambudy menyampaikan bahwa "transformasi digital merupakan strategi utama mendorong pertumbuhan ekonomi. Indonesia punya potensi besar untuk menjadikannya pengungkit." Dari sisi industri, Ketua Umum AFTECH Pandu Sjahrir menegaskan pentingnya menyamakan persepsi lintas pemangku kepentingan. "Transformasi digital bukan sekadar tren, melainkan fondasi menuju ekonomi yang lebih tangguh. Kepercayaan publik adalah kunci memperkuat iklim investasi," katanya.

(Bersambung ke halaman berikutnya)

Sebagai langkah konkret, AFTECH dan Bappenas meluncurkan Digital × Real Sector Launchpad. Program ini menghubungkan ekonomi digital dengan kebutuhan sektor riil lewat pendekatan co-creation—mulai dari identifikasi masalah, desain solusi, uji coba, hingga evaluasi berbasis data.

Ketua Dewan Pengawas AFTECH, Arsjad Rasjid, mengingatkan bahwa target pertumbuhan hanya mungkin dicapai jika pemerintah dan pelaku usaha berjalan beriringan sebagai “mesin ganda” produktivitas. Ia menawarkan empat resep: memperkuat infrastruktur digital, membangun interoperabilitas data, menyiapkan talenta digital, serta menjaga integritas lewat perlindungan konsumen. “Hanya dengan cara itu digitalisasi bisa benar-benar terasa dampaknya bagi masyarakat,” katanya.

Bagi AFTECH, inisiatif Launchpad bukan sekadar *gimmick*. Program ini merupakan realisasi dari amanah visi dan misi organisasi sebagaimana tercantum dalam AD/ART. Lebih dari itu, Launchpad adalah wadah untuk membawa harapan dan semangat positif bahwa transformasi digital bisa memberi nilai tambah nyata bagi sektor riil, memperkuat inklusi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang lebih berkelanjutan. Menjadi energi baru yang mendorong daya saing sektor riil, membawa Indonesia selangkah lebih dekat pada visi pertumbuhan 8 persen dan Indonesia Emas 2045.



Tertarik memperoleh informasi lebih lanjut atau berpartisipasi dalam **Digital x Real Sector Launchpad**, silahkan klik link berikut:
<https://asosiasifintech.org/Info-DigitalxRealSectorLaunchpad>



LIPUTAN KHUSUS: SEKTOR RIIL

AFTECH Going Global: Bawa Fintech Indonesia ke Panggung Internasional

Kiprah Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) dalam mengembangkan layanan keuangan digital mulai diakui oleh dunia internasional. Dalam laporan berjudul *"Fintech Associations: Global Approaches and Good Practices Study"* yang dirilis oleh Cambridge Centre for Alternative Finance (CCAF) pada Maret 2025, AFTECH disebut sebagai salah satu asosiasi fintech yang diakui kontribusinya. Laporan ini melibatkan 136 asosiasi fintech dari ampir 50 negara di dunia, dan menempatkan AFTECH sebagai contoh untuk praktik baik dalam beberapa aspek yang mendukung pembangunan ekosistem keuangan digital yang inklusif dan bertanggung jawab.

Pertama, dalam hal *Good Corporate Governance*, khususnya melalui keberadaan 7 Kode Etik dan alat monitoringnya yaitu Regulatory Compliance System (RCS). Kedua, pada aspek kolaborasi dengan regulator, yang menegaskan posisi AFTECH sebagai mitra strategis dalam mendukung kebijakan pengawasan dan regulasi. Ketiga, di bidang edukasi dan literasi, di mana AFTECH aktif meningkatkan pemahaman publik dan industri mengenai layanan keuangan digital yang aman.

Sebagai bagian dari sosialisasi laporan tersebut, AFTECH juga mengisi 3 (tiga) sesi workshop internasional yang digelar CCAF:

- Workshop 1 (3 Juni 2025) bertema *Revenue Generation and Value Propositions*. AFTECH diwakili oleh Mercy Simorangkir, Direktur Eksekutif AFTECH.
- Workshop 2 (2 Juli 2025) bertema *Regulatory & Policy Engagement*. AFTECH diwakili oleh Marshall Pribadi, Wakil Ketua Umum I AFTECH.
- Workshop 3 (23 Juli 2025) bertema *Vision to Value: Crafting and Measuring Your Impact*. AFTECH diwakili oleh Budi Gandasoebrata, Wakil Ketua Umum II AFTECH.

(Bersambung ke halaman berikutnya)

Partisipasi aktif ini memperlihatkan bahwa peran AFTECH tak hanya tercatat dalam laporan, tapi juga dipercaya membagikan praktik baik di forum internasional.

Bagi anggota AFTECH, pengakuan dalam laporan CCAF menjadi penegasan bahwa standar tata kelola dan praktik yang mereka jalankan telah berada pada level global. Sementara bagi AFTECH, capaian ini menempatkannya bukan semata sebagai asosiasi payung, melainkan motor perubahan yang mengibarkan nama Indonesia di kancah internasional.

Lebih jauh, AFTECH memandang momentum ini sebagai peluang strategis untuk memperkenalkan potensi anggotanya kepada dunia. Dengan membawa nama Indonesia ke panggung global, asosiasi berharap dapat menarik minat investor sekaligus mempercepat pengembangan ekosistem layanan keuangan digital yang inklusif dan berkelanjutan di tanah air.



#MajuBersama

Bersinergi dorong pertumbuhan ekonomi dan keuangan digital indonesia

Jadilah bagian dari AFTECH

Anggota Luar Biasa [ALB]

Manfaat Keanggotaan

- 
 Akses advokasi prioritas untuk konsultasi bersama regulator.
- 
 Terlibat kolaborasi riset & kebijakan dalam penyusunan *policy brief, white paper, dll.*
- 
 Mendapatkan akses terhadap survei industri, laporan *policy*, dan hasil riset AFTECH sebagai referensi organisasi.
- 
 Berkesempatan aktif dalam program kerja departemen serta forum kerja bersama anggota lainnya.
- 
 Terlibat dalam kegiatan networking, business matching, dan kolaborasi dengan pelaku ekonomi digital nasional.
- 
 Kolaborasi penyelenggaraan program edukasi & literasi serta kampanye komunikasi bersama regulator.
- 
 Kolaborasi penyelenggaraan event, training, dan project edukasi bersama mitra strategis.
- 
 Manfaatkan kanal komunikasi AFTECH guna meningkatkan awareness melalui sosial media, newsletter bersama, kegiatan PR bersama seperti media visit, media monitoring dan lain lain.

Tata Cara Pendaftaran



Anggota Luar Biasa adalah kategori kenggotaan di AFTECH khusus bagi asosiasi di ekosistem ekonomi dan keuangan digital di Indonesia yang memiliki misi dan visi yang sama untuk mendorong inovasi keuangan digital yang bertanggung jawab dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Regulatory News:

HukumOnline

LPBBTI Diperluas: Peran Surat Berharga Pemerintah Ditambahkan, Perjanjian Pendanaan yang Ada Harus Disesuaikan Paling Lambat 31 Januari 2026

SUMBER: HUKUMONLINE.COM

Pada akhir tahun 2024, Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") menerbitkan Peraturan [No. 40 Tahun 2024 \("POJK 40/2024"\)](#) tentang Layanan Pendanaan bersama Berbasis Teknologi Informasi ("LPBBTI"). Sebagaimana judulnya, peraturan tersebut mengatur berbagai ketentuan yang secara khusus membahas penyelenggaraan layanan LPBBTI. Di antara bidang-bidang lain, POJK 40/2024 secara umum mengatur berbagai persyaratan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara LPBBTI ("Penyelenggara") terkait kegiatan usaha dan distribusi dana.¹

Sekarang, dalam upaya untuk memperjelas ketentuan-ketentuan dalam POJK 40/2024, OJK menerbitkan Surat Edaran [No. 19/SEOJK.06/2025](#) tentang Penyelenggaraan LPBBTI ("SEOJK19/2025"), yang secara resmi berlaku pada 31 Juli 2025.² Pemberlakuan SEOJK 19/2025 ini secara bersamaan mencabut dan membuat [No. 19/SEOJK.06/2023 \("SEOJK 19/2023"\)](#) tidak berlaku, yang memiliki judul dan membahas hal yang sama dengan SEOJK 19/2025.³

Meskipun mempertahankan sebagian besar ketentuan yang semula diatur dalam SEOJK 19/2023, Surat Edaran baru ini memperluas cakupan keseluruhan kegiatan usaha LPBBTI dan memperkenalkan beberapa ketentuan baru yang secara khusus mengatur mekanisme Rapat Umum Pemberi Dana ("RUPD") serta persyaratan pendanaan.⁴ Selain itu, perlu dicatat bahwa perjanjian pendanaan yang ditandatangani sebelum berlakunya SEOJK 19/2025 akan tetap berlaku hingga tanggal berakhirnya.⁵ Sementara itu, perjanjian antara penerima ("Penerima Dana") dan pemberi pendanaan ("Pemberi Dana") yang sudah berlaku sebelum penerbitan SEOJK 19/2025 harus disesuaikan dengan ketentuan baru paling lambat 31 Januari 2026.⁶

(Bersambung ke halaman berikutnya)

[1] Lebih lanjut mengenai POJK 40/2024, lihat ILB No. 5050.
[2] Recital dan Bag. XXII.2, SEOJK 19/2025.
[3] Bag. XXII.1, SEOJK 19/2025.

[4] Bag. V.1, SEOJK 19/2025.
[5] Bag. XXI.4, SEOJK 19/2025.
[6] Bag. XXI.6, SEOJK 19/2025.

Berdasarkan latar belakang di atas, edisi Indonesian Legal Brief (ILB) kali ini menyajikan ringkasan ketentuan baru yang diatur dalam SEOJK 19/2025 dan membandingkannya dengan SEOJK 19/2023 yang telah dicabut dan diganti, khususnya terkait dengan hal-hal berikut:

1. Revisi Kegiatan Usaha LPBBTI;
2. Mekanisme RUPD; dan
3. Kriteria Kelayakan Pemberi dan Penerima Dana serta Batas Maksimum Pendanaan.

Revisi Kegiatan Usaha LPBBTI

Selain berbagai layanan utama LPBBTI yang boleh ditawarkan Penyelenggara (yaitu penyediaan, pengelolaan, dan pengoperasian LPBBTI) berdasarkan SEOJK 19/2023, kerangka SEOJK 19/2025 kini juga mengizinkan Penyelenggara untuk melakukan kegiatan lain sebagai berikut:⁷

1. Bertindak sebagai mitra distribusi atas surat berharga pemerintah untuk mendukung
2. program pemerintah;
3. Kerja sama layanan informatif; dan/atau
4. Kegiatan lain, sebagaimana diizinkan berdasarkan persetujuan OJK.

Selain itu, SEOJK 19/2025 menjelaskan bahwa kegiatan lain yang disebutkan pada poin (3) di atas dapat mencakup kegiatan yang berkaitan dengan penugasan pemerintah, pengembangan layanan pendanaan yang meningkatkan risiko Penyelenggara, dan/atau kerja sama dengan pihak lain untuk perolehan bisnis.⁸ Dalam hal ini, kerja sama untuk tujuan perolehan bisnis hanya dapat dilakukan jika kegiatan tersebut dituangkan dalam perjanjian kerja sama tertulis, tidak bertujuan untuk melakukan penguasaan pasar, dan tidak melibatkan konflik dengan pihak-pihak yang bekerja sama dengan Penyelenggara.⁹

Dalam hal kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan prinsip syariah, SEOJK 19/2025 mewajibkan Penyelenggara untuk menggunakan jenis-jenis akad berikut:¹⁰

Al-bai'

Ijarah

Mudharabah

Musyarakah

Wakalah

***Wakalah bi
al-ujrah***

Qardh

(Bersambung ke halaman berikutnya)

[7] Bandingkan Bag. II.1, SEOJK 19/2023 dengan Bag. II.1 - 2, SEOJK 19/2025.

[8] Bag. II.6, SEOJK 19/2025.

[9] Bag. II.8, SEOJK 19/2025

[10] Bag. III.2, SEOJK 19/2025.

Selain itu, SEOJK 19/2025 juga telah merevisi berbagai aspek pendukung yang berkaitan dengan penggunaan jenis akad yang tercantum di atas, yang memastikan kepatuhan dengan prinsip-prinsip syariah. Aspek-aspek pendukung ini dirangkum dalam tabel di bawah ini:¹¹

Aspek	SEOJK 19/2023	SEOJK 19/2025
Fatwa dan/atau pernyataan kepatuhan syariah yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia ("MUI")	✓	✓
Opini dari Dewan Pengawas Syariah ("DPS") penyelenggara mengenai penggunaan akad tertentu untuk kegiatan usaha yang didasarkan pada prinsip syariah, setelah terlebih dahulu memperoleh persetujuan atau konfirmasi dari MUI	✓	
Opini dari DPS mengenai penggunaan kontrak tertentu untuk kegiatan usaha dalam hal fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian syariah belum dikeluarkan		✓

Mekanisme RUPD

RUPD dapat diselenggarakan jika dianggap perlu oleh Penyelenggara, Pemberi Dana, dan/atau Penerima Dana. Jika Penyelenggara berencana untuk menyelenggarakan RUPD, maka Penyelenggara wajib menyusun pedoman pelaksanaan, yang setidaknya harus mencakup ketentuan-ketentuan berikut:¹²

1. Prosedur pelaksanaan, termasuk hak Pemberi Dana untuk menghadiri RUPD dan menggunakan hak suaranya, hak Penerima Dana untuk menghadiri RUPD (jika diperlukan), mekanisme rapat (daring atau luring), serta pemberitahuan dan pemanggilan rapat.
2. Mekanisme pelaksanaan, yang harus memastikan bahwa RUPD dipimpin oleh seorang pemimpin rapat, mengikuti proses pelaksanaan yang telah ditetapkan, dan melibatkan proses pengambilan keputusan yang adil; dan
3. Pedoman pelaksanaan, yang harus menjelaskan prosedur pengajuan usulan RUPD, dokumentasi pelaksanaan dan keputusan, biaya pelaksanaan yang harus ditanggung oleh Penyelenggara, serta pemilihan dan penetapan pimpinan RUPD.

(Bersambung ke halaman berikutnya)

[11] Bandingkan Bag. III.2, SEOJK 19/2023 dengan Bag. III.2, SEOJK 19/2025.

[12] Bag. V.2 - 3, SEOJK 19/2025.

Biaya-biaya yang terkait dengan pelaksanaan RUPD harus ditanggung oleh Penyelenggara. Oleh karena itu, semua RUPD harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan kompleksitas dan kapasitas Penyelenggara yang bersangkutan, sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan di atas.¹³

Kriteria Kelayakan Pemberi dan Penerima Dana Dana serta Batas Maksimum Pendanaan

Dibandingkan dengan kerangka SEOJK 19/2023 sebelumnya, SEOJK 19/2025 kini menjelaskan kriteria kelayakan yang lebih rinci untuk Pemberi Dana dan Penerima Dana, sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:¹⁴

Kriteria Pemberi Dana	Kriteria Penerima Dana
1. Pemberi Dana Profesional dapat meliputi: 1) Warga Negara Indonesia (berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah, dengan penghasilan bruto tahunan melebihi Rp. 500 juta, dan total pendanaan yang tidak melebihi 20% dari penghasilan tahunan mereka di satu Penyelenggara; 2) Warga Negara Asing; 3) Badan hukum Indonesia/asing; 4) Badan usaha Indonesia/asing; dan/atau 5) Lembaga Internasional.	1. Warga negara Indonesia yang berusia di atas 18 tahun atau telah menikah, dengan penghasilan bruto bulanan rata-rata sebesar Rp. 3 juta yang menggunakan perangkat mereka sendiri selama proses pendanaan;
2. Pemberi Dana nonprofesional, yang dapat meliputi warga negara Indonesia berusia paling rendah 18 tahun atau sudah menikah, dengan penghasilan bruto	2. Badan hukum Indonesia; dan/atau
tahunan yang lebih kecil atau sama dengan Rp. 500 juta, dan total pendanaan yang tidak melebihi 10% dari penghasilan tahunan di satu Penyelenggara. Perlu dicatat bahwa rasio pendanaan yang belum dilunasi untuk Pemberi Dana non profesional terhadap total pendanaan yang belum dilunasi untuk semua Pemberi Dana telah ditetapkan maksimal 20%.	3. Badan usaha Indonesia.

(Bersambung ke halaman berikutnya)

[13] Bag. V.4 - 5, SEOJK 19/2025.

[14] Bag. IX.2 - 6, SEOJK 19/2025.

Perlu dicatat bahwa distribusi dana oleh Pemberi Dana, serta pembayaran kembali oleh Penerima Dana, harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan. Selain itu, untuk memastikan bahwa Pemberi Dana dan Penerima Dana memahami risiko pembiayaan, mereka juga harus mengisi pernyataan pemahaman menggunakan format yang disediakan dalam Lampiran SEOJK 19/2025. Selain itu, semua Pemberi Dana dan Penerima Dana harus memenuhi persyaratan usia dan penghasilan minimum yang telah disebutkan di atas, serta menyerahkan pernyataan pemahaman yang dimaksud paling lambat 1 Januari 2025.¹⁵

Selain itu, SEOJK 19/2025 menegaskan bahwa batas maksimum pembiayaan konsumtif dan produktif yang dapat diberikan kepada Penerima Dana telah ditetapkan sebesar Rp 2 miliar.¹⁶ Namun, Penyelenggara dapat memberikan pendanaan melebihi batas hingga Rp 5 miliar jika Penyelenggara dapat memiliki kualitas pendanaan macet maksimal 5% selama enam bulan terakhir dan tidak dikenakan sanksi OJK yang sedang berlangsung (terutama pembatasan atau pembekuan).¹⁷

Selain itu, Penyelenggara juga harus memastikan bahwa total pendanaan yang diberikan kepada semua Penerima Dana sesuai dengan batas maksimum pendanaan jika Penyelenggara memberikan pendanaan kepada beberapa Penerima Dana melalui sumber pendapatan atau arus kas yang sama untuk pembayaran kembali, atau memiliki hubungan afiliasi.¹⁸

SEOJK 19/2025 lebih lanjut menjelaskan bahwa hubungan afiliasi tersebut dapat mencakup hal-hal berikut, di antaranya:¹⁹

1. Hubungan keluarga melalui perkawinan atau darah hingga derajat kedua, jika Penerima Dana adalah badan usaha atau badan hukum;
2. Dipekerjakan secara langsung oleh Penerima Dana, jika Penerima Dana adalah individu;
3. Tindakan yang dilakukan atas nama Penerima Dana lain, di mana Penerima Dana bukan badan usaha, badan hukum, atau individu; dan seterusnya.

Poin Penting

SEOJK 19/2025 kini telah memperkenalkan sejumlah kegiatan usaha tambahan yang diizinkan, serta menjelaskan mekanisme RUPD sembari memperketat persyaratan kelayakan dan batas pendanaan bagi Pemberi Dana dan Penerima Dana. Perubahan penting meliputi kriteria yang lebih jelas pendapatan dan status, pernyataan wajib mengenai pemahaman risiko, serta batas pendanaan yang lebih tinggi bagi penyelenggara yang patuh dengan kinerja kredit yang kuat. Sementara itu, perlu dicatat bahwa semua perjanjian yang ada tetap berlaku, namun harus disesuaikan dengan ketentuan baru paling lambat 31 Januari 2026.

Tentang Hukumonline

Hukumonline didirikan 25 tahun lalu oleh beberapa praktisi hukum dan pengacara Indonesia yang bertujuan untuk menjadi solusi satu atap bagi praktisi hukum Indonesia. Kini, Hukumonline telah menjadi sebuah platform regulasi berbasis teknologi (reg-tech) yang mendemokratisasi akses hukum dan memberdayakan para praktisi hukum dengan berbagai layanan berbasis AI seperti Regulatory Compliance System Cloud serta Allex. Kunjungi Hukumonline.com untuk mengetahui solusi lainnya.

[15] Bag. XXI.1, SEOJK 19/2025.

[16] Bag. X.1, SEOJK 19/2025.

[17] Bag. X.2, SEOJK 19/2025.

[18] Bag. X.3, SEOJK 19/2025.

[19] Bag. X.4, SEOJK 19/2025.



**Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH)
mengusung komunitas Fintech & UMKM
yang berjalan maju ke depan secara
solid dan berkelanjutan**

Anggota AFTECH dan UMKM binaan menjadi bagian dari pergerakan ekonomi digital yang berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan edukasi literasi dan lokakarya yang diselenggarakan oleh AFTECH beserta regulator guna meningkatkan perkembangan ekosistem UMKM yang mampu beradaptasi dengan transformasi digital.

Bersama-sama **Fintech & UMKM Jalan Terus** dalam menciptakan ekosistem ekonomi digital yang lebih kuat, resiliens, dan maju dengan menciptakan ruang "entrepreneurship" yang adaptif dan berdikari.

Untuk informasi lebih lanjut dan partisipasi dalam **Program FULUS**, silahkan menghubungi AFTECH Sekretariat melalui email: marcomm@fintech.id

SEKILAS ADVOKASI AFTECH

Daftar Peraturan Terkait Fintech yang Keluar Mid Maret-Akhir Juli 2025 dan Masukan Kebijakan yang Disampaikan Secara Tertulis

Masukan Tertulis Yang Telah AFTECH Kirimkan Kepada Regulator terkait Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dalam Ekosistem Layanan Ekonomi dan Keuangan Digital

Mid Maret - Akhir Juli 2025



RSEOJK tentang Penyediaan Informasi dan Penyampaian Informasi untuk Pemasaran Produk dan Layanan Jasa Keuangan (RSEOJK P3)



RSEOJK tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Layanan Pengaduan (RSEOJK Laporan Layanan Pengaduan)



RPOJK tentang Penerapan Tata Kelola dan Manajemen Risiko di Sektor ITSK



RPMK tentang PPN dan PPh atas Transaksi Aset Kripto



Roadmap IAKD 2024-2028



Rancangan Roadmap AI Nasional

Daftar Peraturan Perundang-Undangan terkait Fintech Yang Dikeluarkan Periode Mid Maret - Akhir Juli 2025

Mid Maret - Akhir Juli 2025

1. Peraturan OJK No. 16 Tahun 2025 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan serta Penilaian Kembali bagi Pihak Utama di Sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan serta Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto

Overview:

Regulasi ini mengatur proses penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test) serta penilaian kembali untuk pihak utama, seperti pemegang saham pengendali, direksi, dan komisaris, di sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), aset keuangan digital, dan aset kripto. Fokusnya adalah memastikan integritas, kompetensi, dan stabilitas keuangan pihak utama untuk mendukung tata kelola yang baik dan melindungi konsumen.

Link regulasi: <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/POJK-16-Tahun-2025-Penilaian-Kemampuan-dan-Kepatutan-serta-Penilaian-Kembali-bagi-Pihak-Utama-di-Sektor-ITSK-AKD.aspx>

2. Surat Edaran OJK No. 4/SEOJK.07/2025 tentang Pelaporan Penyelenggara Inovasi Teknologi Sektor Keuangan Yang Memiliki Izin Usaha di Otoritas Jasa Keuangan

Overview:

Surat edaran ini menetapkan pedoman penerapan program Anti Pencucian Uang (APU), Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT), dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPPSPM) untuk pedagang aset keuangan digital. Regulasi ini mewajibkan pedagang untuk menerapkan identifikasi pelanggan, pemantauan transaksi, dan pelaporan aktivitas mencurigakan guna memitigasi risiko kejahatan keuangan.

Link regulasi: <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/SEOJK-4SEOJK072025-Pelaporan-Penyelenggara-Inovasi-Teknologi-Sektor-Keuangan-Yang-Memiliki-Izin-Usaha-di-OJK.aspx>

(Bersambung ke halaman berikutnya)

3. Surat Edaran OJK No. 16/SEOJK.07/2025 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang, Pencegahan Pendanaan Terorisme, dan Pencegahan Pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal bagi Pedagang Aset Keuangan Digital

Overview:

Surat edaran ini mengatur kewajiban pelaporan bagi penyelenggara ITSK yang telah mendapatkan izin usaha dari OJK. Tujuannya adalah memastikan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi melalui pelaporan berkala terkait operasional, keuangan, dan kepatuhan terhadap ketentuan OJK

Link regulasi: <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/SEOJK-16-SEOJK07-2025-Penerapan-Program-APU-PPT-dan-Pencegahan-Pendanaan-Proliferasi-Senjata-Pemusnah-Massal-Pedagang-AKD.aspx>

4. Surat Edaran OJK No.19/SEOJK.06/2025 tentang Penyelenggaraan Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi

Overview:

Surat edaran ini mengatur tata cara penyelenggaraan layanan pendanaan bersama (platform fintech lending) yang berfokus pada tata kelola, pelindungan konsumen, manajemen risiko, dan kepatuhan penyelenggara terhadap regulasi. Peraturan ini memperkuat ekosistem pendanaan digital, memastikan transparansi, dan melindungi kepentingan pemberi serta penerima dana.

Link regulasi: <https://ojk.go.id/id/regulasi/Pages/SEOJK-19-SEOJK06-2025-Penyelenggaraan-LPBBTI.aspx>

KALENDER KEGIATAN

FINTECH INTERNASIONAL

Agustus 2025

26-27 Agustus 2025

Manila Tech Summit

Theme: "Forging a New Global Order: Risks and Opportunities Redefined"

Hosted by: Fintech Alliance Philippines

September 2025

1-2 September 2025

FinTechOn 2025 & AFA Summit

Theme: "Fintech x Global Supply Chains: A New Strategic Landscape"

Hosted by: Taiwan Fintech Association and Asia Fintech Alliance

16-17 September 2025

Bangkok Digital Finance Forum (by invitation only)

Hosted by: Bank of Thailand and Thai Fintech Association

Melbourne, 17-18 September 2025

Intersekt 2025

Theme: "Future Is Now" - reflecting how the cutting-edge innovation shaping financial services is unfolding right before our eyes

Supported by: Fintech Australia

Oktober 2025

6-10 Oktober 2025

Fintech Week London 2025

Theme: Connecting Financial Capitals for Global Impact

Sydney, 16-17 September 2025

12th Annual Fintech & Banking Summit

Key Theme: (i) Bank - Fintech Collaboration; (ii) AI in Banking and Finance; (iii) How Innovation Drives Competition in Banking

Supported by: Fintech Australia

November 2025

12-14 November 2025

Singapore Fintech Festival

Theme: "Shaping the next decade of growth"

Supported by: SFA

26-28 November 2025

Korea Fintech Week

Theme: "FinTech x AI — The Personalization of Finance"

Supported by: KORFIN



RISK & GOVERNANCE SUMMIT 2025

EMPOWERING THE GRC ECOSYSTEM
TO DRIVE ECONOMIC GROWTH AND NATIONAL RESILIENCE



WELCOMING REMARKS
SOPHIA WATTIMENA

Ketua Dewan Audit merangkap Anggota
Dewan Komisioner OJK



KEYNOTE SPEECH
BUDI PRIYONO

Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan
Republik Indonesia



OPENING SPEECH
MAHENDRA SIREGAR

Ketua Dewan Komisioner OJK



GRC INSIGHT
EMIL ELESTIANTO DARDAK

Wakil Gubernur Jawa Timur

GENERAL SESSION 1



EDIMON GINTING

Senior Advisor, Climate Change
and Sustainable Development
Department, ADB



JOWIL PLECERDA

Senior Officer,
Digital Economy Division,
ASEAN Secretariat



LEE JUN HO

Adviser, Financial Market
Stabilization Department,
South Korea FSS



AVILIANI

Wakil Ketua Umum
Bidang Analisis Kebijakan
Makro-Mikro Ekonomi, KADIN Indonesia



BEILI WONG

Director, The Institute of
Internal Auditors (IIA) Global Board



NAI SENG WONG

Executive Director, Strategy,
Risk & Transactions
Deloitte Southeast Asia



JEAN BOUQUOT

International Federation
of Accountants (IFAC) President

MODERATOR



SELASA, 19 AGUSTUS 2025
09.00 - 15.00 WIB



LIVE YOUTUBE
OTORITAS JASA KEUANGAN



EARN CPE POINTS
FROM COLLABORATING
ASSOCIATIONS

GENERAL SESSION 1

GRC INSIGHT

GENERAL SESSION 2



NITIA ANISA

Jurnalis



ANDY F. NOYA

Talk Show Host



ADE NURUL SAFRINA

Jurnalis

ONLINE REGISTRATION

[HTTPS://ONLINE.RGSOJK-2025.COM](https://online.rgsojk-2025.com)





PUSAT PENANGKANAN PENIPUAN TRANSAKSI KEUANGAN



Launching

Kampanye Nasional

BERANTAS SCAM DAN AKTIVITAS KEUANGAN ILEGAL

19 Agustus
2025

Hotel Raffles Jakarta

Ciputra World 1, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 3-5,
12940 Jakarta, Indonesia.

Seminar Internasional
**“Preventing and Combating
Financial Scams”**

08.00 s.d. 12.00 WIB

**2nd Indonesia Digital Bank
Summit 2025**

*“Securing Economic Growth:
Trusted Digital Finance as an
Enabler of an Inclusive Economy”*

13.00 s.d. 17.00 WIB

Sinergi untuk Melindungi



Indonesia Digital Bank Summit 2025

“Securing Economic Growth: Trusted Digital Finance as an Enabler of an Inclusive Economy”

19 August 2025
09.00 - 17.00 WIB

Raffles Hotel, Jakarta

20+ Inspirational speakers from the banking industry, fintech, technology service provider, and leading industries.

5+ Interactive panel discussions full of insight and innovation.

15+ Attractive booths from banks, fintech companies, technology service providers, media and industries

Opportunity to network with **500+** professional participant from the banking, fintech, and innovative digital finance industries

Don't miss this special session with IASC and OJK!
Launch of the National Campaign
"Waspada Penipuan dan Keuangan Illegal"

09.00 - 12.00 WIB



REGISTRATION IDBS 2025 HERE

<https://asosiasifintech.org/RegistrasiIDBS>



www.fintech.id



fintech.id



Asosiasi Fintech Indonesia

DIAMOND SPONSOR

BNI direct

PLATINUM SPONSOR

privy

GOLD SPONSOR

CLIK
CRIF Lembaga Informasi Keuangan

SILVER SPONSOR

ADVANCE. AlForesee EASYCASH oradian®
finpay jalin lintasarta SIJITU
M2P SPE TeleAI trustingsocial

CYBERSECURITY WORKSHOP SPONSOR



SUPPORTING PARTNER

PERBANAS ASPI Asbanda
ASBISINDO IBI PERBINA
ADIGSI

MEDIA PARTNER:

B UNIVERSE BERITA SATU INVESTOR.ID
MNC life infobank D katadata



INFINITY GOES TO CAMPUS

in Conjunction with

KALTIM DIGIFEST

“Ayo, mengenal ragam produk dan layanan Fintech!
Bersama jadi #SipalingFintech”

300+

Mahasiswa dan Dosen/Pengajar
dari Universitas Politeknik, SMK
dan Institusi Pendidikan lainnya
di Samarinda

Doorprize
Menarik



Free
E-Certificate



**Sabtu, 30 Agustus 2025
09.00 - 12.00 WITA**

Kantor Perwakilan Wilayah Bank Indonesia
Provinsi Kalimantan Timur, Jl. Gajah Mada No.1,
Jawa, Samarinda, Kalimantan Timur



Daftar di sini:
[https://asosiasifintech.org/
RegistrasiINFINITYSamarinda](https://asosiasifintech.org/RegistrasiINFINITYSamarinda)

Informasi lebih lanjut:

Jonathan Erwan
(Marketing Communication AFTECH)
+62 87775791736 / jonathan.pratama@fintech.id



www.fintech.id



fintechid



fintech.id



Asosiasi Fintech Indonesia



KEMENTERIAN KEBUDAYAAN
PENGETAHUAN BANGSA DAN
KONSEP KERJASAMA
REPUBLIK INDONESIA



HADIR KEMBALI

FEKDj x IFSE 2025

30 OKTOBER - 1 NOVEMBER 2025

**SINERGI DAN INOVASI UNTUK
AKSELERASI TRANSFORMASI EKONOMI
& KEUANGAN DIGITAL INDONESIA**

Informasi lebih lanjut terkait
keterangan ini dapat diperoleh dengan
menghubungi **PIC AFTECH Sekretariat**:

El Wibowo - elwibowo@fintech.id



Geser untuk info lengkap ➤



Asosiasi Fintech Indonesia

Eco-S Coworking & Office Space Sahid Sudirman Residence,
Jl. Jenderal Sudirman No.86 2nd floor,
Karet Tengsin, Tanah Abang, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10220

 www.fintech.id

 fintech.id

   fintechid

 [Asosiasi Fintech Indonesia](https://www.youtube.com/AsosiasiFintechIndonesia)

